



MONOGRAF PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL



Didiek Tranggono
Praja Firdaus N.
Ririn Puspita Tutisari
Sri Tjondro Winarno

Monograf
Pengembangan Inovasi
Berbasis Potensi Masyarakat
dan **Kearifan Lokal**

Didiek Tranggono
Praja Firdaus N.
Ririn Puspita Tutiasri
Sri Tjondro Winarno



2021

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

**Monograf Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi
Masyarakat dan Kearifan Lokal**

Penulis

Didiek Tranggono
Praja Firdaus N.
Ririn Puspita Tutiasri
Sri Tjondro Winarno

Desain Cover

Azizi Nur Maysaroh

Layout

Yulia Kunthi
Mohammad Soeroso, BE

Copyright © 2021 PMN Surabaya

Diterbitkan & Dicitak Oleh

CV. Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya 2021

Jl. Griya Kebraon Tengah XVII Blok FI - 10, Surabaya

Telp/WA : 085645678944

E-mail : penerbitpmn@gmail.com

Anggota IKAPI no.125/JTI/2010

ISBN : 978-623-6611-45-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta.

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Atas ridho dan rahmat hanya dari Allah SWT, maka buku ini dapat dirampungkan. Tak pelak, puja dan puji syukur selalu disematkan pertama dan utama kalinya kepada Allah SWT. Tak lupa, haturan terima kasih juga disampaikan kepada rekan dan kolega di UPN “Veteran” Jawa Timur atas semangatnya yang tiada henti dan aura positif yang selalu muncul dari ruang kami yang kecil namun bermakna.

Buku ini masih berupa kepingan paling kecil dari besarnya ruang lingkup studi praksis pemberdayaan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, tentu masih banyak kekurangan dan celah yang ada di buku. Sebagai penulis, kami sangat mengharapkan kolaborasi dan revisi lebih lanjut dari berbagai pihak yang memiliki ketertarikan dengan isu maupun semangat yang sama.

Dalam buku ini tersematkan semangat kami untuk selalu bisa menginisiasi dan ikut membangun pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah, khususnya di provinsi Jawa Timur. Semoga buku referensi ini berguna bagi para pembaca. Atas semuanya kami haturkan terima kasih.

Surabaya, September 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	
Macam dan Peran Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	
Masyarakat	1
A. Pemaknaan dan Definisi Inovasi	1
B. Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat	3
C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Agro-industri	6
BAB II	
Potensi dan Inovasi Area Pesisir	13
A. Kondisi Area Pesisir	13
B. Potensi Pengembangan Area Pesisir	18
BAB III	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Potensi dan Kearifan Lokal	
Masyarakat	21
A. Ekonomi-Sosial-Budaya Masyarakat Pesisir	23
B. Potensi Masyarakat Pesisir	31
BAB IV	
Studi Pemberdayaan Pesisir Di Sidoarjo	35
A. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal	40
B. Kewirausahaan Sosial	40

C. Proses Pemberdayaan Perempuan Pesisir	43
BAB V	
Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Trenggalek	51
A. Bina Sumber Daya Ikan	51
B. Bina Pembuatan Bakso Ikan	52
C. Pemberdayaan Unit Kegiatan Bersama	53
D. Tantangan Usaha Bakso Ikan di Tasikmadu	55
BAB VI	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Bamboonomics</i>	57
A. Gambaran Ringkas Obyek Pemberdayaan	58
B. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan	60
C. Hasil Pelaksanaan	63
BAB VII	
Kesimpulan dan Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Inovasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	4
Gambar 1.2 Umbul Ponggok Klaten, Jawa Tengah	4
Gambar 1.3 Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang	5
Gambar 1.4 Ekowisata Kawasan Ubud, Bali	5
Gambar 4.1 Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berbasis Potensi Lokal (Model Enam Bina)	42
Gambar 5.1 Kegiatan pelatihan cetak bakso Ikan dengan mesin otomatis	53
Gambar 5.2 Produksi Bakso Ikan Di Desa Tasikmadu	55
Gambar 6.1 Produk Monumental Masyarakat Desa Tegaren	64
Gambar 6.2 Lokasi Wisata Desa Tegaren	66
Gambar 6.3 Kopi Van Dillelem atau Van Hart dalam kemasan siap dipasarkan	67

BAB I

Macam dan Peran Inovasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

A. Pemaknaan dan Definisi Inovasi

Inovasi adalah usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga, dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan. Inovasi yang dimaksud adalah upaya menciptakan cara, proses, dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi kunci pengembangan desa, tanpa inovasi pengelolaan potensi dengan cara biasa akan menghasilkan sesuatu yang biasa pula (Endan, 2015).

Inovasi adalah pembaharuan yang terjadi dalam kondisi tertentu sehingga menimbulkan kondisi baru yang beda dari sebelumnya dan digunakan untuk menjawab permasalahan pada saat itu (Sanjaya, 2008). Oleh karena sifatnya yang ke-baru-an tersebut, inovasi seringkali muncul pertama kali dalam bentuk ide atau opini atau gagasan. Inovasi akan menimbulkan pro dan kontra, sehingga dengan sifatnya yang “baru” tersebut inovasi belum tentu berlangsung lama dan dapat membuat senang/berhasil semua orang (Tranggono & Putra, 2020; Tranggono dkk, 2020).

Sedangkan menurut Joseph Schumpeter, inovasi adalah melakukan kreasi dan kombinasi sehingga orang dapat mengunduh nilai tambah dari obyek yang dilakukan inovasi padanya (DPR, tt). Definisi menurut Schumpeter ini lebih banyak dipahami dalam konteks ekonomi pembangunan. Oleh karena itu definisi ini juga dekat dengan mutasi industri dan revolusi perekonomian sebuah entitas (Tranggono & Putra, 2020). Dengan menggunakan definisi

ini, maka inovasi memiliki peranan penting dalam dimensi ekonomi.

Menurut Ojosalo (2008) terdapat tiga macam konsep dan pengejawantahan inovasi, yakni inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pasar. Inovasi produk merupakan pembaruan dalam produksi barang/jasa. Tujuan dari inovasi produk adalah peningkatan pendapatan. Sedangkan inovasi proses adalah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, sehingga mempercepat proses dan menghemat tenaga yang dikeluarkan. Sedangkan inovasi pasar adalah peningkatan target pasar sehingga ekonomi akan terus bertumbuh dan meningkat.

Model inovasi dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif efektif ketika pendampingan mampu menerapkan prinsip-prinsip: (1) Partisipatif menganalisis potensi pasar hasil-hasil produk masyarakat; (2) Partisipatif dalam pengembangan usaha produktif masyarakat; (3) Pengembangan inovasi tepat guna; (4) Menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil usaha produktif mereka; dan (5) Pengembangan kemitraan sinergis dengan para pihak dalam sistem bisnis usaha produktif berkelanjutan (Sumardjo, 2015).

Contoh model inovasi yang telah diteliti dan dikembangkan oleh Kurniawan dkk, (2013) adalah terciptanya inovasi di UPK Kecamatan Wonosalam dalam pelaksanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan) yaitu terdiri dari dua bentuk yaitu pembinaan kelompok dan penekanan angka tunggakan. Kedua bentuk inovasi tersebut merupakan hasil inisiatif dari masyarakat Kecamatan Wonosalam yang difasilitasi melalui proses MAD (Musyawarah Antar Desa). Kedua bentuk inovasi ini dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku dalam PTO PNPM-MPd. Sehingga menghindarkan UPK Kecamatan Wonosalam dari sanksi yang berlaku.

Selanjutnya menurut Sumarjo, (2015), program pemberdayaan masyarakat telah menghasilkan inovasi, sebagai berikut: (1) Pengembangan usaha jamur kelompok dengan sistem *zero waste*; (2) Pengolahan berbagai jenis makanan berbahan dasar jamur (3) Pemanfaatan kotoran domba menjadi pupuk organik; (4) Pemanfaatan jerami untuk pakan ternak; (5) Desain kandang inovatif untuk meminimalkan bau kotoran ternak, pencemaran lingkungan, dan mudah dibersihkan; dan (6) Integrasi pendidikan non formal (keaksaraan dan kesetaraan) dengan pendidikan kewirausahaan (Sumardjo dan Adi Firmansyah, 2015).

B. Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hubungannya dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, muncul istilah desa inovatif. Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungannya secara mandiri. Beberapa contoh desa inovatif adalah Beberapa contoh model desa/kampung inovasi yang dapat dilakukan, diantaranya: Inovasi Pendidikan Untuk si Miskin; Inovasi Pemanfaatan Lahan Kosong; Inovasi Penataan Pasar Tradisional; Inovasi Berbasis Desa/Kampung : Kampung/Desa Wisata-Budaya; Kampung/Desa Sadar Hukum; Kampung/Desa Sadar & Terampil; Kampung/Desa Sehat; Kampung/Desa Sahabat Anak; Kampung/Desa Ramah Lingkungan Alam; Kampung/Desa Wirausaha; Kampung/Desa Aman Bencana; Kampung/Desa KB; Kampung/Desa Gaul. (Endan, 2015)



Gambar 1.1 Bagan Inovasi dalam Pemberdayaan Masyarakat (Endan, 2015)

Berikut adalah beberapa contoh desa inovatif yang menjadi percontohan bagi daerah lain (Tranggono dkk, 2020).



Gambar 1.2 Umbul Ponggok Klaten, Jawa Tengah



Gambar 1.3 Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang



Gambar 1.4 Ekowisata Kawasan Ubud, Bali

C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Agroindustri

Pembangunan pertanian termasuk bagian dari pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis kepada kemampuan produksi, keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Mengembangkan agribisnis yang berorientasi terhadap pasar regional, nasional, dan internasional dengan keunggulan komparatif produk-produk daerah sumber daya alam dan sumber daya manusia berdasarkan kompetensinya dan keunggulan kompetitif.

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal berada pada posisi strata sosial ekonomi terbatas sehingga persoalan modal dan keterbatasan teknologi serta peralatan menjadi kendala yang dinilai serius selama ini. Kendati faktor modal usaha dan terbatasnya teknologi dinilai sebagai faktor penghambat yang paling banyak dikeluhkan, maka pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten selalu mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pemberdayaan merupakan implementasi penguatan sumberdaya lokal untuk dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakatnya sendiri sebagai perwujudan bentuk pembangunan bottom up yaitu segala permasalahan dan solusi pemecahannya berorientasi kepada azas pemanfaatan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya lokal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan pola pembangunan yang berorientasi *top down*, dimana masyarakat hanya sebagai obyek dan tidak dilibatkan sebagai subyek pembangunan, oleh karena itu, maka pembangunannya jelas kurang relevan dengan tujuan dari pembangunannya. Pemberdayaan adalah membenahi kapasitas masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlebih dahulu memberikan kekuasaan kepada mereka. Pemberdayaan tidak hanya secara individual tetapi juga kolektif, namun karena proses pemberdayaan merupakan

wujud perubahan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan melalui penguatan modal, penguatan teknologi, dan pendampingan yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengelola sebuah usahasecara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok tersebut akan mempengaruhi tingkat keberdayaan kelompok, dan kesejahteraan anggota kelompok. Pemberdayaan kelompok melalui kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai positif dirasa masih banyak permasalahan ditingkat implementasinya, sehingga anggota masyarakat belum secara totalitas mau menjadi kelompok dan turut pada program pemberdayaan untuk masyarakat di daerah tertinggal di Kabupaten Trenggalek. Marzuki (2002) menyatakan bahwa kriteria masyarakat yang berdaya/tangguh diera global adalah memiliki etos kerja yang tinggi, prestatif, peka dan tanggap, inovatif, religius, fleksibel, dan jati diri yang berorientasi pada pembangunan. Proses pemberdayaan masyarakat tersebut bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat seoptimal mungkin. Masyarakat yang dimaksudkan adalah kumpulan dari orang perorangan. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat miskin. Salah satu konsep pembaharuan pembangunan adalah “pemberdayaan” (*empowerment*) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan menjadi konsep kunci untuk menanggapi kegagalan pelaksanaan pembangunan selama ini. Pembangunan yang relevan adalah pembangunan yang seharusnya direncanakan dan dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Rakyat bukan menjadi penonton pembangunan dan seharusnya pula pembangunan yang dilaksanakan dapat memperkuat rakyat dan bukan membuat rakyat semakin lemah.

Pengembangan agroindustri merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan. Sebagai industri berbasis sumber daya, agro-industri berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja. Hal ini dinilai strategis mengingat Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di daerah tropis yang memiliki keragaman hayati (*biodiversity*) cukup besar (Saragih, 2002). Mikkelsen (2001) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebuah tujuan yakni partisipasi yang akan menghasilkan pemberdayaan, dimana setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Affendi dan Ernani (2004) mengemukakan salah satu jalan terbaik untuk memberdayakan petani adalah mengembalikan semua hak-haknya meliputi: hak tanah pertanian, hak atas memiliki keanekaragaman hayati, hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling menukar dan menjual benih, hak untuk memperoleh benih yang baik, (5) hak untuk memperoleh informasi yang benar, dan hak untuk memperoleh harga yang layak dan dorongan kepada petani untuk bertani secara berkelanjutan. Meskipun kegiatan usaha bersama berbasis potensi lokal merupakan usaha yang menguntungkan akan tetapi besaran keuntungan yang diterima belum seimbang dengan tingkat korbanan faktor produksi. Pengembangan diversifikasi yang dilakukan terhadap potensi lokalnya maka ketidakberdayaan dan kemiskinan akan tetap menjadi milik petani yang mayoritas menggantungkan hidupnya kepada kegiatan usaha bersama. Dengan adanya otonomi daerah yang semua Kabupaten berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, begitu juga pemerintah Kabupaten Trenggalek yang mempunyai potensi produksi potensi lokal maka akan terus melakukan upaya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan yang diarahkan untuk mampu mengembangkan usahanya ke arah usaha yang produktif dan bisa memberikan kemaslahatan masyarakatnya.

Kecamatan Watulimo dengan potensi sumberdaya alamnya yang begitu melimpah, terutama sektor pertanian serta perikanan ditunjang dengan sektor pariwisatanya pantai prigi. Kecamatan Bendungan dengan potensi sektor pertanian khususnya hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kemudian Kecamatan Tugu demikian juga memiliki potensi sektor pertanian dan kerajinan anyaman bambunya, maka sangatlah reevan jika potensi-potensi lokal yang dimiliki untuk terus ditumbuh-kembangkan melalui pemberdayaan masyarakat dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka pemberdayaan ekonomi keluarga yang diperoleh hasil dimana semua responden mengatakan mempunyai manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat serta masyarakat memiliki respon yang sangat baik.

Contoh dalam pembahasan ini adalah Kabupaten Trenggalek. Meskipun memiliki kondisi yang variatif, di tingkat desa telah ada berbagai kelembagaan ekonomiyaitu kelompok usaha bersama dan koperasi.

Pengembangan KUB yang dilatarbelakangi oleh kenyataan lemahnya aksesibilitas terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Petugas pendampingan menjadi agen untuk berbagai fungsi, tidak hanya menghantarkan teknologi, tapi juga pemenuhan saprotan dan modal usaha.

Kelembagaan pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Trenggalek, misalnya, pada dasarnya merupakan suatu sistem inovasi teknologi yang memadukan inovasi aspek teknis sekaligus inovasi aspek kelembagaan yang berbasis keunggulan sumberdaya

lokal yang dapat mendukung ekonomi keluarga, artinya bahwa kegiatan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan potensi-potensi lokal melalui penggunaan teknologi pengolahan yang selama ini kebanyakan digunakan sebagai dikonsumsi sendiri. Sedangkan potensi keunggulan potensi lokal di Kabupaten Trenggalek sebagai sumberdaya lokal yang dimaksud tidak hanya menyangkut sumberdaya produksinya tetapi juga sumberdaya sosial dengan cakupan aspek yang luas (kemampuan sumberdaya manusia, budaya lokal, kepemimpinan lokal, sistem kekerabatan masyarakat). Berdasarkan hal tersebut maka penumbuhan kelembagaan dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan KUB di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada faktor-faktor potensial yang dapat mendukung pengembangan kegiatan agroindustri berbasis potensi lokal yang merupakan salah satu potensi yang cukup besar. Peran agroindustri berbasis potensi lokal yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mampu mengurangi kemiskinan masyarakat dan keluarganya baik bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung pembangunan sektor agroindustri berbasis potensi lokal akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan peran secara tidak langsung adalah dengan melalui kegiatan pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal maka akan mampu memberikan peluang kerja atau kesempatan kerja. Sedangkan disisi lain dengan upaya pengembangan kegiatan agroindustri akan mampu memberikan nilai tambah dari potensi lokal. Kegiatan agroindustri berbasis potensi lokal mampu meningkatkan nilai ekonomis dari produksi potensi lokal mampu meningkatkan perolehan pendapatan yang cukup tinggi. Selain itu dengan berkembangnya aktivitas kegiatan agroindustri berbasis potensi lokal maka upaya peningkatan optimalisasi potensi sumberdaya

dapat dilakukan dengan baik selain itu akan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan pedesaan.

Lembaga produksi merupakan elemen lembaga industrial berbasis potensi lokal yang harus dibentuk untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukan oleh kelompok melalui pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Pembentukan kelompok ini dapat berbasis pada domisili petani, hamparan lahan atau komoditas yang diusahakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Penumbuhan lembaga pemasaran hasil dimaksudkan untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan untuk meningkatkan posisi tawar, dan meningkatkan efisiensi pemasaran hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Lembaga ini dapat dikembangkan dengan membentuk kelompok pemasaran yang merupakan bagian dari organisasi kelompok usaha bersama. Pada kelompok pemasaran tersebut dapat dilibatkan anggota kelompok yang memiliki pengalaman dalam kegiatan pemasaran hasil. Pengembangan lembaga pemasaran dapat juga ditempuh melalui pembinaan lembaga pemasaran yang tersedia dengan sasaran utama menciptakan pembagian nilai tambah pemasaran secara proporsional antara kelompok usaha bersamadengan pelaku pemasaran.

Menumbuhkan kelembagaan pengembangan agroindustri melalui pemberdayaan ekonomimasyarakat di daerah tertinggal yang saling terkait secara harmonis baik dalam kaitan fungsional maupun kaitan institusional merupakan bagian dari sistem inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan kelompok usaha bersama menjadi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hasil survei menunjukkan masyarakat selalu berpartisipasi setiap ada kegiatan dari pemerintah daerah setempat. Untuk mempercepat terbentuknya kelembagaan agroindustri melalui pemberdayaan kelompok usaha bersama ini diperlukan bantuan dari luar berupa organisasi

pendampingan baik dari perguruan tinggi, lembaga independen maupun lembaga lainnya. Affendi dan Ernani (2004) mengemukakan salah satu jalan terbaik untuk memberdayakan masyarakat adalah mengembalikan semua hak-haknya salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, dan hak untuk memperoleh harga yang layak.

BAB II

Potensi dan Inovasi Area Pesisir

A. Kondisi Area Pesisir

Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar luas wilayahnya adalah lautan. Luas total area Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kawasan daratan negara ini berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jumlah pulau yang dimiliki negara ini adalah sebanyak 17.499, menjadikan negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (kkp.go.id, 2017). Sebagai negara maritim kepulauan terbesar Indonesia memiliki garis pantai yang panjang pula, tercatat garis pantai Indonesia kurang lebih 81.000 km. Garis pantai sepanjang itu menjadikan area pesisir sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti penangkapan berbagai jenis ikan, budidaya rumput laut dan transportasi antar laut (Tranggono dkk, 2019).

Area pesisir disebut sebagai area transisi antara laut dan daratan (Kay dan Alder, 2005). Berdasarkan pendapat Dahuri (1996), yang dimaksud dengan area pesisir adalah tempat bertemunya daratan dan lautan dimana segala macam proses yang terjadi tergantung dari interaksi yang sangat intens dari kedua area daratan dan lautan tersebut. Definisi terkait area pesisir ditegaskan Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Area Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyatakan bahwa Area Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Jadi, di area pesisir terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia

dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut (Tranggono dkk, 2019).

Scura, dkk (1992) dalam Cicin-Sain dan Knecht (1998) mengemukakan bahwa areal pesisir mempunyai karakteristik di antaranya yaitu: (a) Memiliki habitat dan ekosistem (seperti estuari, terumbu karang, padang lamun) yang dapat menyediakan suatu barang (seperti ikan, minyak bumi, mineral) dan jasa (seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi) untuk masyarakat pesisir; (b) Dicitrakan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai *stakeholders*, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumber daya; (c) Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari area pesisir yang dapat menghasilkan GNP (*Gross National Product*) dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir dan lain-lain; (d) Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan area urbanisasi.

Ditinjau dari sisi ekologis area pesisir merupakan suatu area peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif. Batas area pesisir ke arah darat mencakup daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan (seperti pasang surut, percikan air gelombang, intrusi air laut dan angin laut). Sedangkan batas area pesisir ke arah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, termasuk air sungai dan aliran air permukaan, sedimentasi, pencemaran dan lain-lain yang merupakan penghubung bagi dampak yang dihasilkan dari kegiatan manusia di daratan ke lingkungan laut (Tranggono dkk, 2019). Pada area pesisir terdapat daerah pasang-surut permukaan air laut. Daerah yang terkena pasang surut itu bermacam-macam antara lain gisik, rata pasang surut, lumpur

pasang surut, rawa payau, delta, rawa bakau, dan padang rumput (Yayasan Terangi dalam Andarini, dkk. 2016). Terdapat juga pola sungai yang berhubungan dengan sungai utamanya halus yang membantu dalam pergerakan vegetasi lumpur. Oleh karena itu, tak heran bila dalam area pesisir ini terdapat berbagai macam ekosistem (Masalu 2008 dalam Djau 2012).

Area pesisir termasuk zona penting (krusial) dan perlu dijaga kelestariannya karena perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Keberlanjutan ekosistem area pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia baik langsung atau tidak langsung maupun proses-proses alamiah yang terdapat di atas lahan maupun lautan (Djau, 2012). Bengen (2001), menjelaskan bahwa ekosistem area pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis, memiliki 4 fungsi dan peran pokok bagi kehidupan umat manusia yakni: (1) Sebagai penyedia sumber daya alam; (2) Penerima limbah; (3) Penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia; dan (4) penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*).

Karakteristik Ekosistem di perairan laut dangkal seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove pada dasarnya dilindungi seperti pada tertera di dalam UU No.32 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1990. Di antara ekosistem lain yang ikut ke dalam area ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem estuaria (Aci 2012).

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang berpotensi menjadi ekowisata (Anwar dan Gunawan 2007). Pohon mangrove biasanya digunakan untuk tempat bersembunyiya udang dan mengurangi abrasi. Selain itu mangrove dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat dari segi transportasi, pedagang, petambak, dan nelayan (Andarini, dkk.,

2016). Tanaman mangrove berperan krusial sebagai perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus (Irwanto, 2006). Secara luas, mangrove memiliki banyak manfaat antara lain sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan lumpur serta penangkap sedimen; penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahannya; daerah asuhan, daerah pencari makan, daerah pemijahan berbagai jenis ikan, berkumpulnya udang dan biota laut lain; penghasil kayu untuk berbagai macam tujuan; pemasok larva ikan, udang dll.; serta sebagai daerah tujuan wisata alam. Biota yang paling banyak dijumpai di dalam ekosistem mangrove adalah *crustacea*, moluska, kepiting, dan berbagai spesies sejenisnya, umumnya dijumpai di hutan mangrove. Kepiting termasuk produk mangrove yang bernilai ekonomis dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar hutan mangrove (Pamudji, 2010 dalam Kahar 2014).

Ekosistem padang lamun memperlihatkan keanekaragaman hayati di area laut (Andarini, dkk. 2016). Lamun termasuk dalam tumbuhan berbunga (*Angiospermae*) yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal, semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu (monokotil) yang mempunyai akar, rimpang (*rhizoma*), daun, bunga dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Ekosistem lamun mampu memberikan nutrisi terhadap biota yang berada diperairan sekitarnya (Azkab, 2010; Bengen 2001). Pada areal tumbuhnya padang lamun merupakan kawasan tempat berkumpul berbagai flora dan fauna akuatik lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Padang lamun juga merupakan habitat hidup alga (rumput laut), kerang-kerangan (molusca), beragam jenis ekinodermata (teripang-teripangan), udang, dan berbagai jenis ikan. Padang lamun merupakan sumber makan bagi ikan dan juga tempat bersembunyi ikan. Padang

lamun berperan sebagai ekosistem tingkat satu, yaitu sebagai produsen makanan berlimpah. Daunnya yang tinggi dan banyak sebagai tempat hidup organisme efit, peredam arus, pengurang erosi dan pengumpul substrat serta sedimen oleh akarnya serta tempat mencari makan ikan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten, 2011).

Ekosistem terumbu karang merupakan kumpulan bertemunya komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Ekosistem ini merupakan ekosistem perairan dangkal yang sangat produktif sehingga sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia. Terumbu karang mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai gudang keaekaragaman hayati laut, tempat tinggal sementara atau tetap, tempat mencari makan, tempat berpijah, daerah asuhan, tempat berlindung bagi hewan laut lainnya. Terumbu karang berfungsi sebagai biofisik dimana siklus biologi kimiawi dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktifitas yang sangat tinggi. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga penghasil kapur yang dikenal dengan nama karang batu. Karang batu yang bentuk koloninya beraneka ragam ini merupakan substrat dasar terumbu karang yang sangat keras dan berfungsi sebagai rumah atau tempat tinggal, tempat berlindung tempat mencari makan dan tempat memijah bagi berbagai macam jenis biota asosiasi terumbu karang lainnya seperti kerang-kerangan, udang-kepiting, bintang laut, cacing laut, sponge, ikan dan plankton. Fungsi dan manfaat terumbu karang antara lain: sumber makanan untuk beberapa jenis ikan, udang, lobster dan ikan; bahan obat-obatan; bahan budidaya; sarana rekreasi laut; tempat memijah, pengasuhan dan pembesaran mayoritas jenis ikan; penghalang erosi dari gelombang air laut; sebagai bahan bangunan, dan lain-lain (Tranggono dkk, 2020).

Estuaria merupakan area pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Estuaria ini biasanya didominasi oleh substrat berlumpur (endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut). (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten, 2011) Estuaria menjadi pusat permukiman berbagai kehidupan, seperti mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi. (Yayasan Terangi, dalam Andarini, dkk. 2016) Berdasarkan karakteristik geomorfologi, estuaria dapat dikelompokkan menjadi: estuaria dataran pesisir, yang pembentukannya terjadi karena kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai; Laguna atau teluk semi tertutup, terbentuk oleh beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut; dan *Fjords*, adalah estuaria yang pembentukannya karena aktifitas glasier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011)

B. Potensi Pengembangan Area Pesisir

Area pesisir memiliki keuntungan ekonomi yang tinggi dan punya potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Area pesisir kaya akan berbagai sumber daya hayati dan hewani. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal (Andarini, dkk. 2016). Sumber daya yang dimiliki area pesisir tidak hanya terbatas pada perikanan tetapi mencakup semua organisme yang ada di lingkungan perairan (Durand 2010). Kehadiran unsur hayati dan non hayati saling melengkapi satu sama lain untuk mengembangkan dan menjaga kelimpahan sumber daya alam area pesisir, khususnya perikanan. Namun, tak hanya potensi perikanan yang besar,

area tersebut juga potensial untuk dikembangkan lebih lanjut di bidang pertambangan, pariwisata bahari maupun ekowisata. (Andarini, dkk. 2016)

Area pesisir Indonesia didukung oleh posisi Indonesia yang strategis. Selain itu, Indonesia memiliki kelebihan alam dibandingkan negara kepulauan lainnya. Gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati lautnya, menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari. Potensi ini tentu didukung oleh bergesernya tren masyarakat yang ingin berwisata menyatu dengan alam (*back to nature*), karena telah stres dengan pekerjaan dan kehidupan kota yang sudah tidak baik bagi kesehatan jiwa dan mental (Tranggono dkk, 2020).

Potensi sumber daya hayati Indonesia sebagai negara tropis, memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat 2000 jenis spesies ikan di perairan negara ini. Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun. Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi keseluruhan. Potensi sumber daya hewani perikanan ini tersebar di 9 area Pengelolaan Perikanan Indonesia. Potensi budidaya laut luasan budidayanya sebesar 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan pesisir dan laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Sedangkan potensi budidaya payau (tambak) mencapai 913.000 ha. Untuk potensi bioteknologi kelautan masih besar peluangnya untuk dikembangkan, seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, dan benih ikan dan udang besar terletak di area perairan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia, dengan lebih dari 400 spesies macamnya. Juga berbagai jenis ganggang laut tersebar di berbagai area pantai. Secara biologi, kawasan pesi-

sir dan laut Indonesia juga mempunyai nilai global, karena perairan Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi seperti tuna, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan paus serta penyu. Potensi kelautan dan perikanan di atas, guna men-dorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mempunyai nilai potensi ekonomi masing-masing: perikanan tangkap US\$ 15,1 miliar per tahun; budidaya laut US\$ 46,7 miliar per tahun; budi-daya tambak US\$ 10 miliar per tahun dan bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun.

Seiring peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan juga semakin bertambahnya jumlah penduduk, nilai ekonomi area pesisir semakin bertambah. Namun, semakin bertambahnya nilai ekonomi area pesisir ini menimbulkan konsekuensi berupa masalah pengelolaan karena terjadinya konflik pemanfaatan yang muncul akibat berbagai kepentingan yang ada di area tersebut (Tranggono dkk, 2020).

BAB III

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Potensi dan Kearifan Lokal

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang menetap tinggalnya, hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di area pesisir. Prianto (2005) mengemukakan karakteristik masyarakat yang hidup di daerah pesisir, secara sosial ekonomis dipengaruhi oleh sumber perekonomian dari area laut. Jenis mata pencaharian mereka umumnya memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di area pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim (Tranggono dkk, 2019).

Johny Purba (2002) membagi masyarakat pesisir menjadi 3 tipe yaitu: a) Masyarakat Perairan, yaitu kesatuan sosial yang hidup dari sumberdaya perairan, cenderung terasing dari kontak dengan masyarakat lain, lebih banyak hidup dilingkungan perairan daripada darat, berpindah-pindah dari satu teritorial perairan tertentu; b) Masyarakat nelayan, golongan ini umumnya sudah bermukim secara tetap di daerah yang mudah mengalami kontak dengan masyarakat lain, sistem ekonominya bukan lagi subsistem tetapi sudah ke sistem perdagangan yaitu hasil sudah tidak dikonsumsi sendiri namun sudah didistribusikan dengan imbalan ekonomis kepada pihak lain; c) Masyarakat pesisir tradisional yang kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumberdaya di daratan sebagai petani, pemburu atau peramu. Pengetahuan tentang lingkungan darat lebih mendominasi daripada pengetahuan lautan.

Sementara itu, Sunoto (1997 dalam Purba 2002) juga membedakan masyarakat pesisir menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kegiatan utamanya, yakni nelayan penangkap ikan dan nelayan petambak. Menurut Sunoto, nelayan penangkap ikan adalah seseorang yang

pekerjaan utamanya di sektor perikanan laut serta mengandalkan ketersediaan sumber daya ikan di alam bebas, sedangkan nelayan petambak pekerjaan utamanya membudidayakan ikan atau sumber daya maritim lainnya yang berbasis pada daratan dan perairan dangkal di area pantai (Tranggono dkk, 2019).

Berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya, masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang khas. Menurut Kusumastanto (2002) dalam Wasak, (2012), masyarakat pesisir memiliki karakteristik umum sebagai berikut: pertama, ketergantungan masyarakat pesisir pada kondisi ekosistem dan lingkungan. Jika kondisi ekosistem buruk, atau terjadi kerusakan lingkungan khususnya pencemaran, hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kedua, ketergantungan terhadap musim, yang merupakan karakteristik paling menonjol di masyarakat pesisir, terutama bagi nelayan kecil. Terdapat musim melaut, yakni ketika kegiatan melaut nelayan lebih sering dilakukan sebab kondisi iklim dan ekosistem baik. Namun sebaliknya, ketika musim paceklik, kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur pada musim ini. Karakteristik yang ketiga adalah ketergantungan terhadap pasar. Ketergantungan ini disebabkan karena komoditas yang mereka hasilkan, terutama ikan, harus segera dijual untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, serta karakteristik hasil laut yang bersifat cepat rusak (Tranggono dkk, 2019).

Terlepas dari karakteristik masyarakat pesisir, iklim juga merupakan aspek yang mempengaruhi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di area pesisir. Dikutip dari Tranggono dkk. (2017), musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang waktu tergantung pada kondisi angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut. Di hampir seluruh areapesisir di Indonesia, iklim tropis memiliki pola musim kemarau (Juni-September) dan musim hujan (Desember-Maret), dengan musim transisi April-Mei dan Oktober-November.

Perubahan iklim tersebut juga memiliki pengaruh terhadap dinamika lingkungan hidup perairan laut. Perubahan iklim ini terkadang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku ikan misalnya migrasi dan memijah, serta periodisitas penangkapan ikan. Pada musim kemarau, angin bertiup dari selatan yang akan mempengaruhi aktivitas nelayan yang berada di sepanjang pesisir pantai bagian selatan. Demikian pula sebaliknya, ketika musim penghujan tiba, aktivitas nelayan di pesisir utara juga terpengaruh karena angin bertiup dari arah barat menuju utara. (Tranggono dkk, 2018)

A. Ekonomi-Sosial-Budaya Masyarakat Pesisir

Secara ekonomi, masyarakat pesisir di Indonesia terutama yang bermata pencaharian sebagai nelayan masih identik dengan kemiskinan (Raharjo dalam Wasak, 2012). Bahkan secara umum, kondisi perekonomian nelayan lebih miskin bila dibandingkan dengan petani. Menurut Raharjo, hal ini terutama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) tantangan alam yang dihadapi oleh nelayan sangat berat, (2) pola kerja yang homogen yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, (3) keterbatasan penguasaan modal, perahu dan alat tangkap, (4) keadaan pemukiman perumahan yang kurang memadai, dan (5) karakteristik sosial ekonomi yang belum mengarah pada sektor jasa lingkungan.

Lewaherilla (2002) menambahkan, masyarakat pesisir yang didominasi oleh usaha perikanan tersebut pada umumnya masih berada di garis kemiskinan karena mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian selain sebagai nelayan, tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu menurut Suprijanto (2006), kawasan pemukiman di pesisir yang mereka tempati, umumnya belum memiliki legalitas, terutama pemukiman yang berdiri di atas hasil reklamasi swadaya masyarakat. Suharti (2000)

dan Manumono (2008), juga berpendapat bahwa masyarakat kawasan pesisir cenderung keras dan agresif. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pesisir yang panas dan terbuka, yang membuat keluarga nelayan mudah diprovokasi. Selain itu, Wasak (2012) juga mengemukakan bahwa kalangan nelayan juga memiliki kebiasaan konsumtif, yang disebabkan oleh mudahnya mendapatkan uang dari hasil maritim. Para nelayan tersebut terbiasa menghadapi sumber daya yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun, serta beresiko tinggi. Karakteristik tersebut terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang dikerjakan. Terkadang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah dan melaut sehari-hari di atas kapal.

Kekayaan laut Indonesia yang melimpah seharusnya dapat menjadikan para nelayan sebagai orang yang kaya raya. Namun Kenyataannya, mereka masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan, bahkan sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menurut Tranggono dkk. (2017), disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya cuaca buruk yang menyebabkan nelayan tidak melaut, sementara kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi yang kemudian menyebabkan sebagian besar dari mereka harus berhutang. Faktor lainnya yang menjadi penyebab kemiskinan di kalangan keluarga nelayan adalah karena sebagian besar nelayan di Indonesia hanya merupakan nelayan buruh dengan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan yang rendah. (Tranggono dkk, 2018).

Rumah tangga nelayan juga memiliki ciri-ciri yang khusus seperti penggunaan area pesisir dan laut (*common property*) sebagai faktor produksi serta jam kerja yang mengikuti kondisi oseanografis, dimana melaut hanya dilakukan rata-rata sekitar 20 hari dalam satu bulan, sedangkan sisanya relatif menganggur.

Demikian juga pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Hal ini mengandung arti bahwa anggota keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh.

Dengan kondisi tersebut, maka keluarga nelayan mau tidak mau hanya mengandalkan usaha dan penghasilan dari kepala keluarga. Minimnya sumber penghasilan tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat yang tinggal di area pesisir umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin (Wasak, 2012).

A.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Sebagaimana usaha di bidang perikanan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, musim, dan pasar, karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Tranggono dkk (2017), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pesisir.

- Ketergantungan pada kondisi lingkungan;

Hal ini disebabkan karena lingkungan memiliki implikasi yang sangat vital bagi kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Keberlanjutan usaha yang dijalankan masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Kondisi masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama pencemaran dari limbah industri maupun domestik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

- Ketergantungan pada kondisi musim;

Karakter ini merupakan yang paling mencolok di kalangan masyarakat pesisir terutama pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan, para nelayan akan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Eksistensi dua musim

ini yang kemudian membentuk karakteristik masyarakat pesisir yang 'tidak hemat'. Hal ini dikarenakan perilaku konsumtif masyarakat pesisir pada saat musim penangkapan, para nelayan mampu membeli barang-barang yang mahal. Namun sebaliknya, pada musim paceklik, pendapatan menurun drastis sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk. Kondisi ini disebabkan karena saat hasil tangkap memuncak, mereka cenderung tidak menyimpan hasil untuk menutupi kekurangan ekonomi ketika kegiatan tangkap menurun, sehingga banyak dari nelayan-nelayan tersebut yang harus meminjam uang bahkan menjual barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhannya. (Tranggono dkk, 2019)

Pendapatan nelayan bersifat cenderung sangat fluktuatif dari hari ke hari. Hal ini terkadang juga menyebabkan kondisi tangkapan sangat tinggi hari ini namun berkurang keesokan harinya atau bahkan kosong sama sekali. Kondisi ini pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah nelayan operasi penangkapan di suatu daerah penangkapan. Di daerah yang padat penduduknya, akan terjadi kelebihan tangkap (*overfishing*). Kelebihan tangkap akan mengakibatkan volume hasil tangkap dari para nelayan menjadi kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka. (Tranggono dkk, 2019)

Kondisi di atas kemudian juga akan mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan masyarakat nelayan maupun petani tambak. Hubungan yang dimaksud adalah pola hubungan yang bersifat patron-klien. Secara sosiologis, hubungan antara patron dan klien merupakan ciri khas di kalangan masyarakat pesisir. Hubungan ini digambarkan dengan nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil maupun buruh tambak yang seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau dari para

pedagang pengumpul (*tauke*) karena keadaan ekonomi yang buruk. Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan hutangnya sehingga bisnis tetap berjalan. Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan/pedagang sehingga para klien harus menjual produknya kepada patron. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominasi dan eksploitasi. (Tranggono dkk, 2019)

- Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat;

Stratifikasi ini kemudian digolongkan lagi menjadi tiga jenis, yakni: (1) stratifikasi karena status ekonomi; (2) stratifikasi karena perbedaan status politik; dan (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan. Stratifikasi berdasarkan ekonomi biasanya didasarkan atas penguasaan alat tangkap. Stratifikasi ini dibagi atas tiga strata kelompok, meliputi strata atas, strata kedua dan buruh nelayan. Strata atas, yaitu mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya.

Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain. Buruh atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak bisa sampai dua atau tiga puluhan. Seringkali nelayan besar juga merangkap sebagai pedagang pengumpul. Namun demikian, biasanya ada pula pedagang pengumpul yang bukan nelayan, sehingga pedagang ini merupakan kelas tersendiri. Strata kedua, adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini, biasanya pemilik tersebut ikut melaut dan memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tetapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja. Strata terakhir adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi lebih banyak pula buruh ini

yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri (Tranggono dkk, 2018).

Stratifikasi karena perbedaan status politik, yaitu jika terdapat ranking sosial berdasarkan otoritas, prestise, kehormatan dan gelar. Misalnya seseorang yang memperoleh gelar sebagai kepala desa dan pemimpin-pemimpin desa memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga-warga biasa. Yang terakhir adalah stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan misalnya stratifikasi pada petani tambak, yang dibagi atas tiga kelompok strata, yakni: (1) strata atas, merupakan mereka yang menguasai tambak yang luas, (2) strata menengah, yang memiliki luas tambak yang sedang/kecil, dan (3) strata bawah adalah mereka yang tidak memiliki tambak, melainkan hanya mengelola atau sebagai buruh.

- Ketergantungan pada pasar;

Karakteristik ini menggambarkan betapa tergantungnya masyarakat pesisir pada keadaan pasar. Karakteristik inilah yang kemudian membuat masyarakat pesisir sangat peka terhadap harga. Perubahan harga yang terjadi pada produk perikanan akan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan ini disebabkan karena hasil tangkap yang harus dijual terlebih dahulu sebelum hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

- Aktivitas kaum perempuan dan anak-anak;

Di kalangan masyarakat pesisir, umumnya kaum perempuan dan anak-anak diikutsertakan dalam kegiatan mencari nafkah. Perempuan baik dewasa maupun anak-anak seringkali bekerja sebagai pedagang ikan, baik pengecer ikan segar maupun ikan olahan. Mereka juga melakukan pengolahan hasil tangkapan, baik pengolahan kecil-kecilan di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai buruh pada pengusaha pengolahan ikan atau hasil tangkap lainnya.

Sementara itu anak laki-laki seringkali telah dilibatkan dalam kegiatan melaut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak ber-sekolah (Tranggono dkk, 2019).

- Karakteristik nelayan pesisir yang rentan terhadap pengaruh eksternal;

Secara biosifik area, ruang pesisir dan laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya memiliki sifat yang khas. Adanya intervensi manusia pada area tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan. Area pesisir dan laut beserta sumber daya tersebut merupakan sesuatu yang tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (*open access*). Namun di beberapa daerah di Indonesia, terdapat beberapa kelembagaan yang mengatur tentang kepemilikan area pesisir dan laut seperti kelembagaan sasi di Ambon, kelembagaan tradisional Awig-awig di Nusa Tenggara Barat, dan kelembagaan Maneeh di Sangihe Talaud.

Tidak adanya kepemilikan yang jelas dan karakteristik *open access* terhadap ruang pesisir, laut, dan sumber daya tersebut nyatanya memicu beberapa pengaruh negatif. Diantaranya timbul konflik kepentingan dalam setiap pembangunan area dan pemanfaatan sumber daya, serta sangat mudah terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas. Selain itu penumpukan limbah-limbah dari daratan seperti limbah industri dan limbah domestik sangat mempengaruhi kondisi mereka. Penurunan kualitas perairan dapat menurunkan hasil tangkap mereka sehingga pendapatan mereka pun merosot. Jika hal ini terjadi maka kondisi ekonomi mereka akan semakin terpuruk (Tranggono dkk, 2019).

- Rendahnya tingkat kesejahteraan dan ilmu pengetahuan;

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sebagian besar penduduk di area pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resources base*), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), Kemiskinan masyarakat nelayan (*problem struktural*), penambangan pasir, kayu mangrove dan lain-lain. Sebagian besar penduduk area pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. (Tranggono dkk, 2018)

- Memiliki sistem kepercayaan adat yang kuat;

Dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beberapa tradisi adat sedekah laut yang masih dilakukan hingga kini. Misalnya tradisi Nyadran di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan agar mereka mendapatkan berkah dari laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah (Tranggono dkk, 2018).

B. Potensi Masyarakat Pesisir

Area pesisir merupakan daerah yang kaya akan sumber daya maritim yang memiliki potensi kekayaan yang begitu melimpah. Potensi tersebut sejatinya dapat digunakan sebagai modal pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya masyarakat di area pesisir apabila dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, *output*, pendapatan, dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat pesisir itu sendiri (Ivan, 2004 dalam Pranada 2014). Namun, sebaliknya, kehidupan masyarakat di pesisir masih jauh dari standar kelayakan hidup sebagaimana mestinya.

Menurut Adisasmita (2006), pemanfaatan potensi kelautan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan serta keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Dari beberapa faktor tersebut, yang menjadi isu utama pada umumnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Pranada (2014), berpendapat rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor stagnasi perekonomian yang dialami masyarakat pesisir. Jika dikembangkan dengan baik, sumber daya manusia di area pesisir sebenarnya memiliki peran penting bagi area tersebut serta terhadap keberlangsungan sumberdaya maritim yang ada.

Hingga saat ini, berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir telah banyak dilakukan, namun pemerintah belum memiliki konsep yang jelas, sehingga penanganan masih bersifat parsial dan tidak terpadu. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari pihak pemerintah maupun sektor swasta yang peduli terhadap pembangunan area pesisir. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, menurut Dahuri (2004

dalam Setiawan, 2010) dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pendidikan, pelatihan, studi perbandingan, praktek lapangan dan riset.

Dari segi pendidikan, rata-rata nelayan hanya memiliki tingkat pendidikan setara Sekolah Dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, pendidikan mereka rendah sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih tinggi kecil kemungkinannya. Selain itu, secara otomatis menunjukkan bahwa tingkat produktifitas yang relatif rendah pula. Dengan pendidikan yang rendah, sebagian nelayan tidak memiliki cukup ilmu untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di daerah mereka. Hal ini kemudian menyebabkan nelayan menjadi tidak maksimal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Para nelayan ini kurang mampu dalam menciptakan produk dari hasil laut yang bernilai jual tinggi. Umumnya mereka hanya mengolah hasil laut seadanya saja, seperti dijadikan ikan asin, atau kerupuk. Padahal hasil budidaya laut dapat menjadi berbagai macam produk makanan maupun kosmetik. (Tranggono dkk, 2018)

Terlepas dari belenggu tersebut, padahal saat ini tidak hanya nelayan laki-laki, nelayan perempuan juga didorong untuk memanfaatkan sumber daya di sektor kelautan dan perikanan (Tranggono dkk, 2019). Apalagi dilihat dari peran perempuan dalam kehidupan masyarakat pesisir yang memiliki kontribusi besar. Nelayan perempuan dianggap mampu mengolah hasil kelautan dan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Produk yang mereka hasilkan pada umumnya diolah menjadi produk lain seperti pemindangan ikan, pengeringan ikan, kerupuk ikan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan nelayan berpeluang untuk menghasilkan produksi perikanan tidak hanya berupa barang mentah, namun menjadi barang jadi atau se-

tengah jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan keterampilan yang tinggi, produktifitas juga akan semakin tinggi, sehingga dapat memicu peningkatan pendapatan (Tranggono dkk, 2018).

BAB IV

Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Sidoarjo

Bronwyn A. Hunter, Leonard A. Jason dan Christopher B. Keys (2012) dalam tulisan mereka “*Factors of Empowerment for Women in Recovery from Substance Use*” menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu konstruksi inter-disipliner yang didasarkan pada teori-teori psikologi masyarakat. Meskipun pemberdayaan memiliki landasan teoritis yang kuat, hanya ada beberapa penelitian kuantitatif dalam konteks-spesifik yang telah dirancang untuk mengevaluasi pemberdayaan untuk populasi tertentu. Hasil dari analisis faktor eksplorasi mengidentifikasi tiga faktor pemberdayaan psikologis yang terkait erat dengan konsep konseptualisasi konseptual sebelumnya, yakni: persepsi diri, pengetahuan dan partisipasi sumber daya. Strategi pemberdayaan memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Tranggono dkk, 2017).

Pemberdayaan juga biasanya ditujukan kepada orang-orang yang kurang memiliki kekuatan karena adanya marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan atau ketidakadilan sosial. Konsep pemberdayaan seringkali juga dikaitkan dengan perempuan, sebab dalam budaya patriarki manusia, posisi perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun berbanding terbalik dengan hal ini, perempuan nyatanya juga menjadi agen dan aktor utama dalam proses pemberdayaan (Sholkamy 2010 dalam Al-Dajani dan Marlow 2013). Pemberdayaan pada masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan merupakan salah satu upaya yang dapat dilaku-

kan untuk membangun masyarakat yang berdaya dan mandiri. Hal ini mengingat area pesisir memiliki potensi dari kekayaan sumberdaya maritim yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional yang mandiri (Pranada 2014).

Seperti yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, area pesisir memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian negara khususnya Indonesia. Keanekaragaman hayati dan hewani laut Indonesia adalah sangat berharga bila dikelola dengan baik. Bahkan, Menteri Perikanan dan Kelautan saat ini, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa sekitar 80 persen dari sumber daya di sektor kelautan dan perikanan belum terjamah dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Antara Riau, 2015). Namun sebaliknya, saat ini area pesisir belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan (Tranggono dkk, 2019).

Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama di area pesisir. Sejumlah kajian baik dari buku, jurnal, literatur maupun sumber lainnya menunjukkan bahwa diperlukan adanya pemberdayaan dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun perguruan tinggi agar area pesisir dapat berperan optimal menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Dengan adanya sinergi antara pihak terkait dan masyarakat dapat membangun masyarakat pesisir yang berdaya dan mandiri. Pada akhirnya diharapkan ekonomi pesisir dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi nasional menuju kemandirian (Pranada 2014). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut. (Tranggono dkk, 2019)

Di Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya telah ada usaha untuk mem-berdayakan masyarakat pesisir. Akan tetapi, dari hasil penelitian di lapangan masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pertama, sistem manajemen dan pengelolaan serta pelayanan kecamatan dan desa masih terhambat oleh kualitas sumber daya manusia perangkat kecamatan dan desa tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya gradasi kualitas pelayanan dan perizinan penelitian. Dari pengalaman peneliti, sejauh ini, kemudahan perizinan dan pelayanan penelitian paling baik didapatkan oleh peneliti dari Kecamatan Buduran yang mencakup tiga desa, yakni Damarsi, Prasung, dan Sawohan. (Tranggono dkk, 2018)

Kedua, sebenarnya telah banyak didirikan kelompok tani tambak. Namun, keberadaannya masih belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani tambak, terutama dikecamatan Sedati. Selama ini kelompok tani sebenarnya telah berhasil menarik perhatian pihak sponsor. Akan tetapi, investasi yang diterima masih belum bisa berdampak secara berkelanjutan terhadap kesejahteraan petani.

Ketiga, Kecamatan Jabon, Candi, dan Sedati merupakan kawasan minapolitan dengan potensi yang cukup tinggi. Meskipun demikian, pola hidup masyarakat dan budaya masyarakat di kawasan tersebut masih sulit dikembangkan untuk menjadi support system peningkatan kawasan minapolitan.

Keempat, Desa Prasung merupakan kawasan minapolitan di daerah Buduran yang paling potensial. Namun, ternyata masih terjadi tidak liniernya political will dari Kepala Desa dan pihak kecamatan. Hal ini mejadikan desa Prasung belum memiliki kegiatan usaha minapolitan yang dikatakan berhasil.

Dari catatan-catatan tersebut, juga sesuai dengan hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dandengan mempertimbangkan beberapa aspek baik kondisi alam, letak geografis dan potensi

sumber daya alam, luas area, jumlah penduduk, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya perempuan nelayan, dan budaya masyarakat khususnya pada 6 (enam) kecamatan sasaran di Kabupaten Sidoarjo, maka beberapa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Sidoarjo. (Tranggono dkk, 2018) Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Membangun keterpaduan dan keharmonisan persepsi, sikap, dan tindakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepemimpinan lainnya;
- 2) Meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang pentingnya pengembangan minapolitan bagi pengembangan kawasan kota-desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menguatkan peran tokoh panutan;
- 3) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat tani yang berkelanjutan dalam pengembangan minapolitan;
- 4) Memberikan bantuan kepada masyarakat pelaku pengembangan minapolitan tanpa menimbulkan ketergantungan;
- 5) Mendorong program dan kegiatan non fisik (ilmu pengetahuan dan teknologi);
- 6) Menciptakan nilai kehidupan masyarakat lokal yang kondusif bagi pengembangan minapolitan; dan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan minapolitan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Selain aspek sosial budaya masyarakat, pengembangan pariwisata dalam kawasan minapolitan juga perlu memperoleh perhatian. Dampak ganda (*multiple-effect*) pariwisata (minawisata) dapat saling menguatkan dalam pengembangan kawasan minapolitan. (Tranggono dkk, 2018)

Berdasarkan hasil identifikasi dan potensi lokal pada 6 (enam) kecamatan sasaran di Kabupaten Sidoarjo baik kondisi alam, letak geografis dan potensi sumberdaya alam, luas area, jumlah penduduk, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya perempuan nelayan, maka penentuan strategi yang digunakan dalam pendekatan pemberdayaan perempuan nelayan dapat ditempuh melalui pendekatan 6 (enam) bina yaitu : (1) bina sumberdaya manusia, (2) bina sumberdaya alam, (3) bina usaha, (4) bina kelembagaan, (5) bina program dan kegiatan, dan (6) bina lingkungan, yang dirangkaikan dengan metode partisipatoris (*participatory approach*). Untuk mensinergikan keenam bina tersebut maka diperlukan kombinasi dari beberapa pendekatan (*mixed approach*) yaitu pendekatan keareaan dan pendekatan *social entrepreneurship* yang dikombinasikan secara simultan dengan metode partisipatoris (*participatory approach*).

Pendekatan partisipasi dalam pemberdayaan bertujuan agar masyarakat tampil sebagai pelaku utama dalam pemecahan masalah dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pendekatan partisipatoris, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memfasilitasi masyarakat agar mengalami proses belajar berdasarkan pengalaman (*experience based learning process*), sehingga dengan belajar dari pengalaman, kapabilitas mereka sebagai masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dapat meningkat. Jadi pendekatan partisipatoris dapat diartikan sebagai dukungan untuk mengimplementasikan rencana pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan yang disepakati oleh masyarakat dalam suatu wadah organisasinya sendiri (Tranggono dkk, 2018).

A. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Baiquni (2006) dalam Hastuti et al (2009) mengemukakan konsep dasar pemanfaatan sumberdaya sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di perdesaan. Pertama, memerlukan peran serta aktor lokal untuk memanfaatkan sumberdaya perdesaan secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan produktivitas melalui perbaikan regenerasi sumberdaya perdesaan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Keempat, peningkatan kualitas hidup dan pengetahuan lokal. Kelima, memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya perdesaan yang berkelanjutan.

Terdapat tiga pilar untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk perdesaan dengan memanfaatkan sumberdaya perdesaan yakni:

- 1) Pengelolaan sumberdaya perdesaan yang berkelanjutan dalam mendukung kehidupan penduduk di perdesaan.
- 2) Pemanfaatan sumberdaya perdesaan untuk memperkuat sosial ekonomi penduduk perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan dan institusi terkait.
- 3) Pemahaman tentang permasalahan dan potensi sumberdaya perdesaan.

B. Kewirausahaan Sosial

Menurut Santosa, Setyanto (2007), *social entrepreneurship* makin berperan dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi. Peran nyata dari *social entrepreneurship* antara lain:

- 1) Berperan dalam menciptakan kesempatan kerja. Keberadaan *social entrepreneurship* di berbagai negara memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakatnya terutama dalam penciptaan kesempatan kerja baru.
- 2) Melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat.

- 3) Menjadi modal sosial, modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh *social entrepreneur* karena walaupun dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai-nilai: saling pengertian (*shared value*), *trust* (kepercayaan) dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*), kesemuanya ini adalah modal sosial.
- 4) Peningkatan Kesetaraan (*equity promotion*).
- 5) Pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui *social entrepreneurship* tujuan tersebut akan dapat diwujudkan, karena para pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikirkan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian aksi (*action research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif. Tahapan yang digunakan dalam memformulasikan model pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. *Look*

Pada kegiatan ini dilakukan observasi, wawancara, asesmen awal terhadap kelompok sasaran (perempuan nelayan), sumber daya lokal, lingkungan sosial ekonomi dan sistem sumber yang terdapat didalam maupun di luar masyarakat.

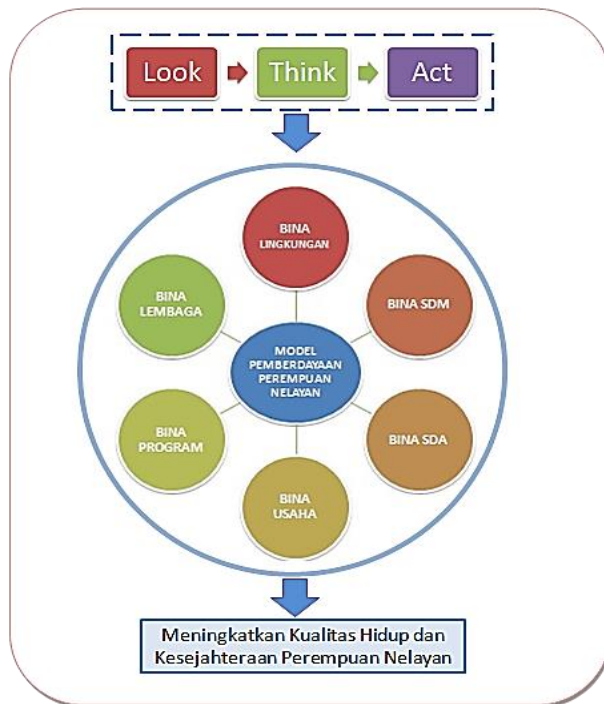
b. *Think*

Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) bersama kelompok-kelompok sasaran maupun potensi dan sistem sumber daya di lingkungannya yang dapat dimanfaatkan dalam program pemberdayaan perempuan nelayan.

c. Act

Pada kegiatan ini dilakukan berbagai bimbingan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi informan kunci dalam penelitian ini adalah para perempuan nelayan yang bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok perempuan nelayan atau kelompok kerja pemberdayaan perempuan yang sudah ada. Selain itu dilakukan juga wawancara kepada tokoh masyarakat setempat, instansi terkait, dan pihak berkepentingan lainnya yang kompeten.

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan formulasi model pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersaji pada gambar 3.1.



Gambar 4.1 Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berbasis Potensi Lokal (Model Enam Bina)

C. Proses Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Proses penelitian ini meliputi beberapa tahapan kegiatan, meliputi tahap persiapan, tahap perlakuan dan tahap evaluasi.

➤ Tahap *Look and Think*

Untuk melaksanakan tahap *look and think* dilakukan berbagai persiapan yang diperlukan, meliputi persiapan secara administrasi maupun persiapan lapangan untuk lokasi penelitian. Secara administrasi meliputi persiapan mengenai rancangan sertatahapan penelitian, perijinan serta kontak awal dengan berbagai pihak yang akan terlibat dalam penelitian. Untuk persiapan lokasi, dilakukan beberapa kegiatan meliputi assesment awal untuk memetakan kondisi subjek penelitian serta *stakeholder* yang akan terlibat (Tranggono dkk, 2020).

Dalam tahapan ini juga dilakukan identifikasi dan analisis potensi dan sistem sumber daya yang tersedia di lokasi penelitian. Melalui kegiatan ini diperoleh data dari subjek penelitian, serta dilakukan diskusi mengenai masalah, kebutuhan dan rencana aksi yang akan dilakukan. Untuk memastikan kondisi sasaran penelitian, juga dilakukan *home visit* untuk triangulasi dengan kondisi lapangan (Tranggono dkk, 2018).

Hasil triangulasi data tersebut akan diperoleh informasi adanya sumberdaya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam diskusi awal, rencana aksi menghasilkan beberapa kesepakatan tentang kegiatan bagi kelompok perempuan nelayan, dengan mempertimbangkan potensi lokal yang ada. Mengingat di lokasi penelitian ini mempunyai potensi produk perikanan yang termasuk produk unggulan di Propinsi Jawa Timur, yaitu bandeng dan udang windu, maka disepakati untuk dilakukan kegiatan pengolahan kedua produk perikanan tersebut dan yang hasil perikanan lainnya yang tersedia untuk dibuat menjadi produk

makanan dan turunannya berbasis ikan seperti: abon ikan, krupuk ikan, pentol ikan, bakso ikan, dan ikan asap dan lain sebagainya. Selain pengolahan hasil perikanan tambak ini, juga diusulkan juga untuk dilakukan pelatihan perikanan air tawar dan ternak itik, untuk diambil telurnya dan dibuat telur asin (Tranggono dkk, 2020).

Dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi dari kelompok perempuan nelayan tersebut, didampingi dan difasilitasi oleh tim peneliti dan pihak kompeten yang terkait. Dukungan dari masyarakat sekitar dan instansi terkait, khususnya peran tokoh masyarakat sangat penting untuk kelanjutan program pemberdayaan perempuan nelayan ini.

Pada tahap ini juga dilakukan pembekalan bagi pendamping sosial untuk kelompok kerja perempuan nelayan yang sudah dibentuk. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar keberadaan kelompok swadaya masyarakat dan warga pada umumnya tetap hidup tanpa mengalami kemunduran, mendampingi kelompok dalam menjalankan fungsi dan peranan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang menjadi anggotanya dan memelihara kelompok ke arah terwujudnya kemandirian (Tranggono dkk, 2020).

Untuk pengelolaan potensi sumberdaya alam atau potensi lokal yang tersedia dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal pengolahan perikanan tambak dan perikanan air tawar dan ternak itik tim peneliti melakukan koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo (bidang pertanian, perikanan dan peternakan). Disamping itu juga akan dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan dinas terkait lainnya di Kabupaten Sidoarjo serta pihak swasta maupun pihak lainnya yang akan terlibat dalam rencana aksi, khususnya dalam tahap pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan kelompok. (Tranggono dkk, 2018)

➤ Tahap *Act*

Beberapa kegiatan pada tahap *Act*, yaitu bimbingan sosial dan kewirausahaan dan bimbingan keterampilan serta pendampingan sosial dan pendampingan kewirausahaan oleh tim pendamping lokal.

○ Bimbingan Sosial dan Kewirausahaan

Kegiatan ini diawali dengan dinamika kelompok oleh tim peneliti dengan tujuan untuk mencairkan suasana, perkenalan serta memberikan motivasi dan semangat. Bimbingan sosial dan kewirausahaan bertujuan meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran tentang permasalahan sosial, keluarga dan kewirausahaan. Diikuti oleh peserta yang merupakan kelompok-kelompok perempuan nelayan yang tersebar di beberapa kecamatan sasaran di Kabupaten Sidoarjo.

Bimbingan sosial yang disampaikan oleh tenaga ahli dan tim pendamping ini bertujuan meningkatkan motivasi kerja perempuan nelayan, dan pembekalan mengenai *social enterpreneurship* untuk mendorong semangat kewirausahaan disampaikan oleh seorang praktisi *entrepreneurship* bahwa ciri-ciri kewirausahaan ini antara lain, percaya diri, keorisinilan, berorientasi kedepan, pengambil resiko dan kepemimpinan. Bimbingan motivasi sosial ini diharapkan mereka memiliki kegigihan dan ketekunan dalam melaksanakan usaha, jangan mudah menyerah dan harus mampu membuktikan bahwa usaha pilihan mereka berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Tranggono dkk, 2020).

Dalam kegiatan ini juga diberikan materi mengenai pentingnya perempuan nelayan berdaya saing dan mempunyai usaha untuk tetap bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

○ Bimbingan Keterampilan

Kegiatan bimbingan keterampilan, bertujuan untuk meningkatnya keterampilan kelompok sasaran dalam membuat produk makanan dan turunannya berbasis ikan seperti: abon ikan, krupuk ikan, pentol ikan, bakso ikan, dan ikan asap dan lain sebagainya. Pelaksanaan bimbingan keterampilan meliputi: Pelatihan pembuatan produk makanan dan turunannya berbasis ikan seperti: abon ikan, krupuk ikan, pentol ikan, bakso ikan, dan ikan asap yang dilatih oleh tenaga ahli dan pelaku langsung seperti pengusaha abon ikan yang sebelumnya sudah pernah mendapat pelatihan dan bantuan modal usaha dari pemerintah. Demikian juga dengan pelatihan pembuatan produk krupuk ikan, pentol ikan, bakso ikan, dan ikan asap, dilatih oleh tenaga ahli dan pelaku langsung yaitu pengusaha ikan asap. Pelatihan pengolahan perikanan air tawar dan ternak itik juga dilakukan untuk mendiversifikasi usaha-usaha perempuan nelayan.

Kegiatan beberapa pelatihan tersebut dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini merupakan hasil koordinasi dalam proses penelitian pemberdayaan perempuan nelayan ini. Koordinasi dengan instansi terkait ini merupakan bagian terpenting dalam model pemberdayaan perempuan nelayan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara instansi terkait, dimana satu sama lain bisa saling mendukung untuk fokus pada program pemberdayaan perempuan nelayan berbasis sumberdaya lokal. Dukungan teknologi melalui bantuan peralatan dari berbagai pihak akan menjadi modal bagi kelompok perempuan nelayan untuk melakukan pengembangan usahanya (Tranggono dkk, 2020).

○ Focus Group Discussion

Proses sinkronisasi program antar instansi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi suatu area berdasarkan identifikasi masalah dan solusi serta program-program aksi yang telah disepakati untuk mendukung terimplementasinya model pemberdayaan perempuan nelayan di kecamatan-kecamatan sasaran. Adapun tujuannya adalah untuk membahas rencana dan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh tim peneliti dalam program pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal.

Pemanfaatan teknologi tepat guna juga menjadi bagian utama yang diperhatikan agar bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sasaran, khususnya kelompok-kelompok perempuan nelayan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan semangat untuk mendukung program-program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pada khususnya dan Provinsi Jawa Timur secara umum di Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan perempuan nelayan, keluarga, masyarakat secara keseluruhan melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Para peserta FGD ini sepakat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan membentuk satu tim tindak lanjut dalam mengimplementasikan model pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal dengan pendekatan *social entrepreneurship* pada kecamatan-kecamatan sasaran di Kabupaten Sidoarjo (Tranggono dkk, 2020).

○ Monitoring dan Evaluasi

Dalam tahapan monitoring dan evaluasi ini dilakukan kegiatan berupa pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam implementasi model pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan dalam bentuk diskusi dengan komunitas dan kelompok-kelompok perempuan nelayan di masing-masing kecamatan. Tim Peneliti, pembantu peneliti, dan pendamping yang ditunjuk bersama dengan tokoh masyarakat, instansi terkait dan pihak lainnya yang terlibat secara periodik harus melakukan pertemuan untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan memastikan terimplementasinya program dan kegiatan yang telah direncanakan (Tranggono dkk, 2020).

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan konsep model pemberdayaan perempuan nelayan berbasis potensi lokal ini, diharapkan dapat memberdayakan perempuan nelayan, antara lain:

- a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan nelayan dalam mengusahakan potensi-potensi lokal yang ada dan tersedia melalui pendampingan dan fasilitasi serta bimbingan sosial dan kewirausahaan.
- b) Terciptanya usaha-usaha baru berbasis potensi lokal.
- c) Tersedianya lapangan kerja baru.
- d) Dimanfaatkannya secara optimal hasil produk perikanan sebagai *revenue generating* yang bisa meningkatkan pendapatan perempuan nelayan, keluarga, dan masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses implementasi model pemberdayaan tidak terlepas dari faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan model pemberdayaan tersebut. Makna implementasi pada dasarnya adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu model pemberdayaandinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi model, yakni kejadian-kejadian, dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah model tersebut diimplementasikan.

Dalam setiap perumusan model pemberdayaan selalu diawali dengan tahapan perumusan masalah, dan pada tahap rumusan masalah yang bertujuan memberikan solusi tersebut, tidak terlepas dari proses perencanaan. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi model pemberdayaan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Demi terwujudnya keberhasilan pelaksanaan model pemberdayaan perempuan nelayan pada beberapa kecamatan sasaran di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara benar dan tepat, yaitu mencakup kegiatan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. (Tranggono dkk, 2018)

BAB V

Studi Pemberdayaan Masyarakat di Trenggalek

Pada kegiatan yang lain, tim penulis melakukan penyuluhan tentang pembuatan bakso ikan melalui mesin pencetak bakso ikan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Masyarakat Desa Tasikmadu sendiri kemudian diberikan satu buah mesin cetak bakso ikan untuk dikelola bersama. Bakso ikan sendiri merupakan salah satu variasi produk pesisir yang dipilih oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa Tasikmadu. Bakso ikan merupakan salah satu produksi olahan yang masih jarang terdapat di kawasan Tasikmadu. Padahal, Tasikmadu merupakan daerah wisata dengan garis pantai paling panjang di Kabupaten Trenggalek. Dengan usaha peningkatan produksi bakso ikan oleh masyarakat desa Tasikmadu, diharapkan mampu menciptakan pasar yang baru dan yang lebih variatif. Sehingga hal tersebut akan mampu menciptakan iklim pariwisata yang baik. (Tranggono dkk, 2020)

A. Bina Sumber Daya Ikan

Sebagaimana telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya, bahwa model pemberdayaan perempuan nelayan adalah dengan melakukan enam tahap pembinaan, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, usaha, program, lingkungan, dan lembaga. Maka, salah satu hal yang paling krusial dalam penerapan penelitian model pemberdayaan perempuan nelayan untuk dibina adalah pemanfaatan sumber daya alam. Jika menilik kondisi pesisir Tasikmadu, atau Kabupaten Trenggalek pada umumnya, maka sumber daya alam paling besar memang berasal dari laut, yakni ikan (Tranggono dkk, 2020).

Dipilihnya ikan sebagai bahan baku/sumber daya alam untuk dibina merupakan satu dari enam strategi pembinaan. Daerah Tasikmadu, Kecamatan Watulimo memang terkenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya ikan. Lokasi Kecamatan Watulimo memang sangat mendukung adanya banyak sekali ikan laut. Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, yang terletak di Desa Tasikmadu merupakan pantai nelayan terbesar di kabupaten Trenggalek. Kondisi geografis ini yang mendukung sekali adanya pembinaan sumber daya alam (Tranggono dkk, 2020).

B. Bina Pembuatan Bakso Ikan

Bina sumber daya manusia tentunya juga dilakukan. Kegiatan penyuluhan tentang cara membuat bakso ikan dengan mesin cetak bakso ikan merupakan salah satunya. Kawasan Tasikmadu memang terkenal dengan dua destinasi wisata pantai utama, yakni Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso. Jika dilihat secara seksama, baik di kawasan Pantai Prigi maupun di kawasan Pantai Karanggongso masih belum banyak terdapat kegiatan ekonomi penjualan bakso ikan. Mayoritas masyarakat masih mengandalkan komoditas utama selama ini, yakni bakaran ikan laut dan ikan asap. Penjualan bakso memang terdapat di dua kawasan tersebut, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan penjualan bakaran ikan laut. Sehingga hal tersebut memberi kesan bahwa aktifitas ekonomi yang ada di kawasan Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso cenderung monoton dengan komoditas yang sama (homogen) dan model pasar semi-terbuka. Kondisi ini menyebabkan setiap pedagang tidak mempunyai ciri khas tertentu yang dapat menjadi daya Tarik bagi konsumen yang berkunjung (Tranggono dkk, 2020).

Oleh sebabnya, adanya penyuluhan sekaligus pelatihan pembuatan bakso ikan diharapkan mampu memberi variasi kegiatan ekonomi kawasan wisata Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso. Selain bakaran ikan, diharapkan tumbuh komoditas utama lainnya, yakni bakso ikan. Variasi ekonomi dengan sendirinya akan memberikan fluktuasi pasar dan gairah baru pada ekonomi masyarakat Tasikmadu, khususnya kawasan Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso. Tidak menutup kemungkinan suatu saat bakso ikan menjadi olahan ikan ikonik bagi masyarakat Tasikmadu yang dapat menjadi daya Tarik bagi turis yang ingin berkunjung di tempat tersebut (Tranggono dkk, 2020).



Gambar 5.1 Kegiatan pelatihan cetak bakso Ikan dengan mesin otomatis

C. Pemberdayaan Unit Kegiatan Bersama

Selain kegiatan bina sumber daya alam dan sumber daya manusia, bina lembaga menjadi sangat penting. Kegiatan ini tergolong sangat krusial karena lembaga adalah entitas legal-formal yang dibentuk dengan budaya dan adat masyarakat sekitar sebagai tempat

bertemunya sumber daya alam (yang dikelola) dengan sumber daya manusia (yang mengelola). Maka pada banyak kasus, kesuksesan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal bertumpu pada pembinaan lembaga. Jika pembinaan lembaga dijalankan dengan baik, sehingga lembaga yang dibina juga berkembang, maka sistem kehidupan masyarakat akan dapat dikembangkan pula. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka sistem kehidupan masyarakat juga akan mengalami stagnasi (Tranggono dkk, 2020).

Oleh karena peran penting pembinaan lembaga inilah, pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal harus juga melibatkan lembaga masyarakat lokal. Pada aplikasi di desa Tasikmadu, kegiatan pemberdayaan masyarakat melibatkan dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) di desa Tasikmadu, yakni KUB Sumber Rejeki dan KUB Sumber Barokah. Dua KUB ini merupakan lembaga paling aktif dalam bidangnya diantara lembaga-lembaga setara lainnya. KUB Sumber Rejeki dan Sumber Barokah diketuai oleh Ibu Susanti, yang merupakan salah satu pedagang bakaran ikan di kawasan Pantai Karanggongso. Melalui kegiatan pembinaan lembaga ini, diharapkan KUB Sumber Rejeki dan Sumber Barokah dapat menjadi pioneer untuk penjualan bakso ikan di kawasan Pantai Karanggongso (Tranggono dkk, 2020).



Gambar 5.2 Produksi Bakso Ikan Di Desa Tasikmadu

D. Tantangan Usaha Bakso Ikan di Tasikmadu

Selain bina sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lembaga, masih terdapat tiga pembinaan lagi, yakni bina usaha, bina lingkungan, dan bina program. Dalam kasus masyarakat desa Tasikmadu ini, bina usaha, bina lingkungan, dan bina program belum bisa dituliskan banyak. Ada beberapa argumentasi yang menjadikannya demikian, yang pertama argumentasi birokrasi administrasi, yang kedua argumentasi teknis lapangan, dan ketiga adalah argumentasi kebijakan (Tranggono dkk, 2020).

Kepala desa Tasikmadu, Wignyo Handoyo, baru saja terpilih menjadi kepala desa pada bulan Mei 2019. Hal ini menyebabkan, secara birokrasi pemerintahan desa Tasikmadu masih belum membentuk sistem pemerintahan yang solid. Hal ini tentu berimbas pada pembinaan program. Sebenarnya telah banyak program pelatihan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan nelayan, yang diadakan di Tasikmadu. Namun demikian, program-program tersebut masih belum menunjukkan efektifitasnya (Tranggono dkk, 2020).

Argumentasi kedua menggarisbawahi pentingnya kebutuhan akan frekuensi waktu yang tidak sebentar untuk melakukan pembinaan program, lingkungan, dan usaha. Penerjunan lapang ke Tasikmadu memerlukan waktu yang lama untuk melaksanakan pembinaan, khususnya pembinaan lingkungan. Karena sudah menjadi stereotipikal bahwa lingkungan pesisir merupakan lingkungan yang kumuh dan hal tersebut menjadikannya sebagai lingkungan yang susah berkembang (Tranggono dkk, 2020).

Argumentasi terakhir adalah kebijakan. Model pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya untuk perempuan nelayan di daerah pesisir, telah dicoba untuk diaplikasikan pada perempuan nelayan desa Tasikmadu yang melibatkan KUB Sumber Rejeki dan Sumber Barokah. Namun, hal tersebut dirasa kurang cukup. Harus ada kebijakan desa dan langkah konkret dari pemerintah desa Tasikmadu, contohnya dengan mengeluarkan peraturan desa yang mendukung adanya pemberdayaan perempuan nelayan desa Tasikmadu. Aspek dukungan kebijakan ini yang menurut tim peneliti kurang ada di desa Tasikmadu (Tranggono dkk, 2020).

Ketiga argumentasi tersebut menjadikan masih adanya tantangan untuk merintis pemberdayaan perempuan nelayan desa Tasikmadu melalui usaha bakso ikan. Tim peneliti telah menjalin komitmen bersama pemerintah desa Tasikmadu untuk terus saling memberikan bekerjasama dalam melakukan pembenahan pemberdayaan perempuan nelayan di desa Tasikmadu melalui keterpaduan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di beberapa tahun ke depan. Pun demikian, kegiatan bina lingkungan dan bina usaha perlu dijadikan fokus utama dalam kelanjutan pemberdayaan masyarakat perempuan nelayan model enam bina. Keberlanjutan menjadi salah satu syarat model enam bina bisa berjalan efektif dan menunjukkan hasilnya (Tranggono dkk, 2020).

BAB VI

Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Bamboonomics*

Desa Tegaren adalah salah satu desa dari 152 desa keseluruhan di Kabupaten Trenggalek. Desa Tegaren sendiri termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tugu. Desa Tegaren berbatasan dengan Desa Tempuran (Kabupaten Ponorogo) di sebelah utara, dengan Desa Dermosari di sebelah barat, dengan Desa Winong di sebelah selatan, dan dengan Desa Prambon di sebelah timur. Desa ini memiliki dua dusun, yakni Krajan dan Tompe. Desa ini memiliki luas wilayah 522,76 Ha yang sebagian darinya, 120 Ha, adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Mayoritas warga Desa Tegaren bermatapencaharian sebagai petani. Artinya adalah para petani yang memiliki lahan mereka sendiri dan mereka mengelola lahan tersebut secara mandiri. Pada musim penghujan, para petani di Desa Tegaren bercocoktanam dengan tanaman padi, dan pada musim kemarau mereka menggantinya dengan jagung, singkong, dan tembakau. Selain petani, beberapa warga juga memelihara ayam dan kambing untuk peternakan. Beberapa warga memanfaatkan keringnya musim kemarau untuk memproduksi batu bata. Sedangkan ada pula perempuan-perempuan paruh baya yang masih memproduksi besek (tempat dari bambu) untuk membantu perekonomian keluarga. Kerajinan bambu berupa besek, memang masih banyak dijumpai di Desa Tegaren, terutama di dusun Tompe.

Desa Tegaren sendiri memiliki sebuah embung (danau buatan kecil) yang terletak di ujung dusun Tompe, yang dinamakan embung Banyu Lumut. Embung ini dibangun pada 1997 namun setelah itu tidak terawat dan terabaikan oleh masyarakat desa.

Padahal, embung tersebut merupakan sumber air penghidupan untuk warga RT. 11 dan 12 dusun Tompe yang terletak dekat sekali dengan perbukitan dan batas daerah menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Sejak tahun 2016 yang lalu, muncul sebuah gagasan untuk kemudian menghidupkan kembali embung Banyu Lumut. Gagasannya adalah mengubah embung Banyu Lumut tidak hanya sebagai penampung air, namun juga sebagai destinasi wisata.

A. Gambaran Ringkas Obyek Pemberdayaan

Pada pertengahan tahun 2017, pemerintah Desa Tegaren melakukan perbincangan lebih serius dengan Perum Perhutani Trenggalek terkait pengelolaan lahan secara mutual. Beberapa saat setelah itu, tepatnya pada awal tahun 2018, UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan program pengabdian masyarakat berupa KKN Bela Negara yang bertempat di tiga daerah prioritas nasional, yakni Trenggalek, Nganjuk, dan Blitar. Desa Tegaren merupakan salah satu dari banyak desa yang kemudian menjadi obyek pelaksanaan program KKN Bela Negara Desa Prioritas Nasional. Semenjak itu, UPN “Veteran” Jawa Timur telah menjadi rekanan Desa Tegaren dalam pengembangan desa, baik untuk program pengembangan embung Banyu Lumut maupun untuk program pengembangan desa wisata. Hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara pemerintah Desa Tegaren, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sepraga Tegaren, dan Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur pada Agustus 2018. Maka, dengan adanya jalinan hubungan institusional antara pemerintah Desa Tegaren, UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Perum Perhutani Trenggalek, proses pengelolaan bersama untuk pengembangan desa wisata Tegaren dimulai.

Dalam rangka menyiapkan Desa Tegaren sebagai salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Trenggalek, pastinya ada banyak sekali yang harus disiapkan. Diantara beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah Desa Tegaren adalah 1) kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, 2) aspek sosial-budaya masyarakat/warga Desa Tegaren yang harus membiasakan diri untuk berubah dan lebih peduli terhadap lingkungan, serta 3) kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat/warga Desa Tegaren yang pada nantinya setelah pengembangan desa wisata berjalan lancar, masyarakat tidak akan mengalami segregasi sosial-ekonomi karena adanya *socio-economical shock*.

Desa Tegaren adalah desa pinggiran. Secara geografis, desa ini memang kurang strategis karena terletak pada perbatasan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo, dan karena letak geografis desa inilah yang kemudian membuat masyarakat/warga Desa Tegaren seakan terjauhkan dari hingar bingar kota. Hal tersebut berdampak pada kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada. Para perangkat desa juga mengeluhkan perihal kemampuan sumber daya manusia yang masih belum mampu untuk memajukan Desa Tegaren. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan desa wisata yang pada nantinya akan memaksa warga Desa Tegaren untuk berbenah secara kualitas sumber daya manusia. Menurut pengamatan tim pengabdian yang sebelum ini pernah berkunjung, salah satu potensi permasalahan sumber daya manusia yang ada di Desa Tegaren adalah *demographic loss*, atau dengan artian yang lain adalah hilangnya populasi pemuda dari sebuah daerah karena berpindah ke daerah yang lain dan tidak kembali. Kasus demikian juga terjadi di Tegaren. Banyak pemuda yang menuntut ilmu di kota-kota besar, namun pada kemudian hari juga enggan kembali ke daerah asal. Ada pula pemuda desa yang merantau mencari pekerjaan sampai ke luar pulau atau sedang bertugas di luar pulau Jawa (Tranggono dkk, 2020).

Jika memang rencana pengembangan desa wisata berjalan lancar, maka warga Desa Tegaren akan dituntut untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar ketimbang sebelumnya. Baik warga dusun Krajan maupun dusun Tompe harus saling bahu-membahu demi kelangsungan pengembangan potensi desa wisata mereka. Hal yang berbahaya bisa terjadi jika modal sosial masyarakat desa, seperti kerukunan sosial dan keguyuban, luntur seiring dengan perkembangan pengembangan desa dan masuknya nilai-nilai sosial dari luar yang kemudian mengganggu kelangsungan budaya masyarakat Desa Tegaren (Tranggono dkk, 2020).

Terdapat satu hal lagi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Desa Tegaren agar bisa diselesaikan, yakni kekuatan kelembagaan masyarakat Desa Tegaren. Jika pada perkembangannya nanti desa wisata Tegaren berjalan dengan lancar, maka perlu penguatan kelembagaan baik secara sosial-ekonomi maupun secara sosial-politik. Pemerintah pusat dalam hal ini sebenarnya telah mempersiapkan berbagai macam *platform* ekonomi agar masyarakat desa bisa berkembang, contohnya seperti koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Hal ini yang kemudian harus diperkuat, karena tanpa pondasi dan improvisasi kelembagaan, maka warga Desa Tegaren akan kesulitan dalam pembentukan keteraturan pengelolaan pengembangan desa mereka nantinya (Tranggono dkk, 2020).

B. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama dalam menawarkan solusi permasalahan yang ada. Menurut organisasi negara-negara maju OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang bekerja sama dengan DAC *Network on Gender Equality* (GENDERNET), pemberdayaan perempuan merupakan akses utama perempuan agar terhindar dari segala pele-

cehan yang ada serta meningkatkan peran serta mereka di masyarakat. Sebuah studi di Brazil mengungkapkan bahwa tingkat keselamatan anak-anak meningkat 20% ketika seorang ibu memiliki kontrol terhadap pemasukan keluarga (DAC Network on Gender Equality, 2011). Pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu pilar kesetaraan *gender* yang mana merupakan pasal kelima dalam 17 poin *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ditambahkan pula bahwa pemberdayaan perempuan secara konvensional meliputi lima (5) unsur yang harus diperhatikan, yakni: 1) kesejahteraan (*welfare*); 2) akses (*access*), 3) konsentisasi (*consentitation*), 4) partisipasi (*participation*), dan 5) kesetaraan dalam kekuasaan (*equality of control*) (Supeni dan Ika Sari, 2011). Pada usulan penelitian ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan menasar pada perempuan lokal Desa Tegaren. Hal ini tentu dilakukan dengan maksud untuk memberikan daya ekonomi produksi sekaligus daya ekonomi konsumsi kepada perempuan lokal Desa Tegaren agar kegiatan ekonomi yang berjalan terus berlanjut dan berkesinambungan (Wesley dan Dublon, 2015).

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, tim pelaksana menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat partisipatif yang memang kemudian terasumsikan lebih efektif ketimbang strategi yang lain. Terdapat pemikiran bahwa dalam pembangunan, baik dari segi sosial maupun ekonomi, akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak ketiga yang berasal dari luar komunitas masyarakat tersebut, atau dari kalangan yang dianggap memiliki strata lebih dibandingkan dengan masyarakat lokal. Namun pada kenyataannya, asumsi akan mekanisme pembangunan seperti yang disebutkan seringkali justru mengalami kegagalan. Kegagalan yang terjadi adalah dikarenakan adanya gap atau pemisah antara solusi permasalahan dengan eksekusi serta nilai yang digunakan pada saat pelaksanaan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat partisipatif muncul untuk menjadi pengembangan dari asumsi tersebut. Dengan adanya

partisipasi dari masyarakat lokal, pembangunan dan pemberdayaan diharapkan mampu mengatasi persoalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Siswanto, 2008).

Konsep terakhir yang ditawarkan sebagai solusi adalah pembangunan kapasitas atau *capacity building*. Pembangunan kapasitas adalah proses pembangunan kemampuan dan keahlian dalam hal memutuskan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan untuk menuju efisiensi dan efektifitas hasil (Raynor dkk, 2014). Pembangunan kapasitas meliputi tiga kata tanya, yakni, *who*, *what*, dan *how*. Dalam konsep *who*, terdapat subyek pembangunan kapasitas, yakni individu, organisasi, kelompok organisasi, dan ekosistem. Pada konsep *what*, terdapat obyek kegiatan pembangunan kapasitas, seperti pengetahuan atau *transfer of knowledge*, keahlian, sistem operasional, dan efektifitas. Sedangkan pada konsep *how*, terdapat predikat (bentuk) dari pembangunan kapasitas tersebut, yakni pelatihan, bantuan teknis, pengalaman, dan pembelajaran kelompok (Raynor dkk, 2014).

Berangkat dari artikulasi ketiga konsep tersebut (pemberdayaan perempuan, strategi pemberdayaan partisipatif, pembangunan kapasitas), maka tim pelaksana menawarkan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan Desa Tegaren adalah pemberdayaan perempuan melalui kerajinan produk bambu untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi desa. Dengan pengabdian tersebut, tidak hanya perempuan lokal yang kemudian memiliki keahlian pengolahan produk bambu, namun desa juga akan terbantu dengan adanya diversifikasi produk desa dan pemberdayaan perempuan lokal. Kerajinan bambu dipilih sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dengan obyek perempuan lokal karena: 1) bambu merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Desa Tegaren; dan 2) banyak perempuan lokal di Desa Tegaren sudah terbiasa dengan kerajinan bambu (*besek*) selama ini (Tranggono dkk, 2020).

C. Hasil Pelaksanaan

Salah satu arti strategis Desa Tegaren adalah desa ini merupakan desa penyangga pariwisata Bendungan Nglingsis yang lokasinya berdekatan. Pada Bendungan Nglingsis, terdapat sentra produk atau kerajinan lokal, sehingga ketika Bendungan Nglingsis nanti telah rampung pembangunannya, diharapkan kerajinan atau produk-produk lokal dari Tegaren dapat dipasarkan di Bendungan Nglingsis. Dengan lokasi yang berdekatan dengan Kabupaten Ponorogo, Bendungan Nglingsis memiliki arti strategis tersendiri bagi Tegaren. Tentu saja Tegaren dan komoditas besek juga akan mendapat imbas positif jika destinasi wisata Bendungan Nglingsis berjalan sukses. Oleh karena itu, diharapkan dengan mengubah Tegaren menjadi desa wisata dan menjadikan ekonomi bambu (besek) sebagai tulang punggung wisata desa akan membawa peningkatan taraf hidup masyarakat Tegaren secara keseluruhan dan dengan gradualitas yang tinggi.

Hampir 100% penduduk perempuan Tegaren bermatapencarian sebagai pengrajin besek. Tegaren sendiri adalah daerah di Kabupaten Trenggalek dengan produksi besek paling tinggi/besar se-wilayah kabupaten. Bagi para penduduk perempuan di Tegaren, kerajinan besek atau keterampilan membesek merupakan warisan budaya lokal yang diturunkan lintas generasi. Dulunya Tegaren merupakan produsen terbesar besek dengan jumlah pengrajin yang lebih banyak daripada sekarang. Bahkan harga 1 kodi besek bisa mencapai hanya Rp. 5.000,-. Harga tersebut menandakan bahwa penawaran besek yang sangat tinggi sekali. Sekarang harga besek per kodi mencapari Rp. 17.000,- sampai Rp. 20.000,-.



Produk Monumental Desa Tegaren : Besek Bambu

Gambar 6.1 Produk Monumental Masyarakat Desa Tegaren

Ada sekurang-kurangnya tiga argumentasi utama mengapa bambu menjadi kunci dalam penggerak ekonomi Tegaren. Pertama, bambu adalah nilai lokal masyarakat. Hampir semua pengrajin bambu Tegaren memiliki lahan di belakang rumah mereka yang tertanam banyak bambu disana. Maka bambu yang didapatkan oleh para pengrajin diambil dari lahan belakang rumah mereka selain mereka membeli dari daerah lain melalui pengepul bambu. Kedua, kerajinan besek sudah dilakukan oleh warga Tegaren sejak dulu, dan bambu selalu hadir dan tersedia. Artinya, mulai sejak dulu, ekonomi bambu ini sudah berputar. Argumentasi kedua, oleh sebabnya, adalah ketersediaan bambu yang melimpah, khususnya di Trenggalek, dan bambu adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable resources*). Sedangkan argumentasi ketiga adalah ekonomi bambu (*bamboonomic*) ini sudah menyatu dengan banyak aspek kehidupan masyarakat Tegaren.

Dalam penentuan konsep Tegaren sebagai desa wisata, Embung Banyu Lumut hendak dijadikan atraksi pariwisata utama desa. Namun, karena lahan embung adalah lahan Perhutani, maka pengelolaan lahan masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut. Diambilah kerajinan besek sebagai atraksi pengganti Embung Banyu Lumut. Konsep yang awalnya adalah “destinasi wisata” kemudian ditetapkan sebagai “desa wisata”. Maka, konsep desa wisata yang dibentuk di Tegaren akan mengutamakan pariwisata edukasi, seperti pariwisata membuat besek, pariwisata membuat batu bata, dan pariwisata bertani.

Ada tiga alasan mengapa pariwisata membuat besek akan menjadi atraksi wisata yang strategis. Pertama adalah karena kerajinan besek dikerjakan oleh penduduk perempuan di Tegaren. Hal ini akan menjadi keunggulan tersendiri karena masyarakat perempuan rural masih memiliki fleksibilitas waktu yang tinggi. Sehingga pariwisata membuat besek akan menjadi atraksi yang bisa dinikmati kapan saja. Alasan kedua adalah kerajinan besek dikerjakan oleh hampir 100% penduduk perempuan Tegaren, yang mana berarti atraksi wisata ini akan bisa dilaksanakan secara sporadis. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena nantinya pariwisata tidak akan dilaksanakan hanya di satu tempat, namun bisa di tempat lain. Sehingga tidak begitu diperlukan jeda waktu yang lama. Alasan ketiga adalah pariwisata membuat besek termasuk wisata edukasi yang juga berarti segmentasi dari pariwisata ini bisa meluas mulai dari kalangan anak-anak sekolah sampai pada orang dewasa. Maka, selain menjadikan Tegaren sebagai salah satu destinasi wisata edukasi, Tegaren juga bisa menjadi rekan institusi pendidikan dalam konservasi budaya kerajinan besek. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena secara pemasaran pariwisata kerajinan besek akan memperluas pemasaran yang ada.

Bamboonomic dipilih karena tiga fondasi analisis keilmuan. Ketiga fondasi tersebut adalah: (1) bahwa ekonomi bambu adalah aset alam dan aset budaya yang sudah menjadi salah satu jantung kehidupan masyarakat Tegaren; (2) bahwa ekonomi bambu yang digabungkan dengan desa wisata akan membuat Tegaren sebagai destinasi wisata yang mengandalkan ways of feeling dari konsep *tourist gaze* 3.0, serta; (3) faktor kepemimpinan yang dimunculkan dan memunculkan ekonomi bambu sebagai denyut kehidupan masyarakat Tegaren.



Gambar 6.2 Lokasi Wisata Desa Tegaren

Satu hal yang perlu diingat adalah konsep desa wisata tidak akan pernah bisa berjalan ketika tidak ada partisipasi dari masyarakat di desa. Oleh sebabnya, partisipasi masyarakat di desa perlu dijaga agar tetap terus meningkat. Perlu dipikirkan akan perencanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya desa wisata. Maka ada tiga saran untuk terus mendukung perkembangan desa wisata Tegaren, yakni: 1) semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin baik; 2) perlu adanya konsolidasi organisasi-organisasi desa yang bersinggungan langsung maupun tak lang-

sung dengan perkembangan desa wisata, dan 3) kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata agar semakin ditambah (Tranggono dkk, 2020).

Pemberdayaan masyarakat di Desa Dompjong pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Desa Tegaren maupun Desa Tasikmadu dalam pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi di Desa Dompjong lebih kepada pemberdayaan dan pengembangan kopi rakyat dan kopi Van Dilleem yang merupakan kopi peninggalan zaman Belanda, karena Desa Dompjong merupakan salah satu Desa di kabupaten Trenggalek yang termasuk desa pada dataran tinggi atau pegunungan.



Gambar 6.3 Kopi Van Dilleem atau Van Hart dalam kemasan siap dipasarkan.

BAB VII

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 lalu dan kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek pada 2019 ini, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir, terutama di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek, kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Kondisi di Kabupaten Trenggalek, menurut pengamatan tim peneliti, lebih baik ketimbang kondisi di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini erat kaitannya dengan usaha branding pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah wisata di pesisir selatan. Sehingga beberapa kecamatan yang terletak di pesisir, seperti kecamatan Watulimo dan Panggul, mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk aspek pemberdayaan dan pembangunan. Hal serupa tidak ditemui di daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Meneruskan dari poin pertama di atas, maka hal tersebut juga berimbas pada kualitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di daerah itu. Khusus untuk perempuan nelayan, hal yang paling mencolok dari kedua daerah itu adalah perempuan nelayan di Kabupaten Trenggalek rata-rata sudah memiliki usaha pribadi. Usaha seperti warung ikan bakar sampai yang terbaru adalah bakso ikan, merupakan usaha perempuan nelayan yang dirintis bersama-sama dalam kelompok usaha. Oleh karena itu, ketika kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan bersama dengan KUB Sumber Rejeki dan Sumber Barokah, para perempuan nelayan di Kabupaten Trenggalek terkesan lebih positif dan bergairah untuk meningkatkan bisnisnya. Hal

serupa juga tidak terjadi di Sidoarjo. Para perempuan nelayan di Sidoarjo hanya berperan sebagai secondary opinion (peran kedua) dalam aktifitas ekonomi keluarga atau masyarakat. Sehingga yang terjadi di Sidoarjo adalah ketidakaturan sistem sosial ekonomi di pesisir Sidoarjo.

3. Tim peneliti merumuskan bahwa perbedaan penerapan model enam bina di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek adalah sebuah keharusan. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, perempuan nelayan di Kabupaten Trenggalek sudah memenuhi standar bina sumber daya alam, sumber daya manusia, usaha, lembaga, dan program. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo, pembinaan yang sudah memenuhi standar adalah bina sumber daya alam, usaha, dan program. Maka pembinaan yang paling krusial di dua kabupaten tersebut sebenarnya adalah pembinaan lingkungan.
4. Pemberdayaan masyarakat di Desa Tegaren melalui ekonomi yang berdasarkan komoditas bambu bisa menjadi potensi pergerakan ekonomi masyarakat lokal yang menjanjikan. Dengan menggunakan potensi komoditas bambu, pemberdayaan masyarakat di Desa Tegaren diharapkan tidak akan menemui banyak kendala karena bambu adalah hasil produksi dari sumber daya alam lokal. Begitu pula pemberdayaan masyarakat di Desa Tasikmadu yang lebih mengandalkan produk olahan berbasis ikan laut, sedangkan di Desa Dompyong lebih kepada pemberdayaan masyarakat berbasis kopi.

Menyikapi kesimpulan yang sudah ada, maka tim peneliti merumuskan dua saran untuk pengembangan dan pemberdayaan perempuan nelayan di daerah pesisir Jawa Timur. Saran tersebut adalah:

1. Perlu dilakukan pembinaan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek. Pembinaan lingkungan ini termasuk yang tersulit karena masyarakat, terutama perempuan nelayan, perlu kesadaran kolektif bahwa lingkungan sangat berperan penting dalam pemberdayaan kaum nelayan di daerah pesisir.
2. Daerah pesisir di Kabupaten Sidoarjo lebih membutuhkan penanganan yang lebih optimal ketimbang Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek sendiri sangat gencar untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk masalah pemberdayaan. Hal ini yang mungkin bisa ditiru oleh Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Affendi, A. dan Ernan, R. 2004. *Perlunya Koordinasi Pembangunan Wilayah Agropolitan Menuju Kerjasama antara Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Masyarakat Komunitas*. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Sarasehan Agropolitan 2004. Pematang.
- Al-Dajani, Haya dan Susan Marlow. 2013. Empowerment and entrepreneurship: a theoretical framework, dalam *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research* Vol. 19 No. 5, 2013 hlm. 503-524. Emerald Group Publishing Limited
- Andarini, Sonja, dkk. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. UPN Veteran Jawa Timur
- Azkab, H, M. 2010. Bahan Ajar Tentang Lamun. Lembaga Penelitian Oseanografi-LIPI: Jakarta.
- Bengen, D.G. 2001. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut (Sinopsis). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Cicin-Sain, B. & R. W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices. Island Press: Washington D. C.
- Dahuri, R. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Area Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dahuri, R.J. Rais. S.P. Ginting, M.J. Sitepu, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Dewan Perwakilan Rakyat. tt. *Teori Schumpeter*. (daring). Tersedia di:
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-317.pdf>. Diakses pada 4 September 2020.
- Djau, Mohamad Sayuti Djau. 2012. Analisis Keberlanjutan Sistem Perikanan di Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Olee dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
- Dwiridhotjahjono, Jojok, Prihandono Wibowo, Praja Firdaus. 2020. "Bamboonomic: Ekonomi Bambu Pendukung Desa Wisata Tegaren", dalam *Jurnal Master Pariwisata, Vol. 6, No. 2, Januari 2020*.
- Endan, S. dkk, 2015, Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif Dalam Penguatan Desa Inovatif Di Provinsi Banten, Peneliti Badan Litbang Daerah Provinsi Banten, KP3B Serang.
- Hastuti, dkk., (2009). *Model Pemberdayaan Perempuan nelayan Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan; Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jogjakarta, Universitas Negeri Jogjakarta.
- Hunter, Bronwyn A., Leonard A. Jason dan Christopher B. Keys. 2012. Factors of Empowerment for Women in Recovery from Substance Use, dalam *Am J Community Psychol (2013) 51;91-102*. Society for Community Research and Action.
- Kahar, Adi Pasah. 2014. Pengembangan Bahan Ajar Ekosistem Mangrove Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA. Universitas Pendidikan Indonesia
- Kay, R.C. & J. Alder, J. 2005. Coastal Planning and Management. London: E&F Spon. Hlm 380.

- Kurniawan, Daniel Teguh, Dzunuwanus Ghulam Manar, Kushadayani. 2013. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM- MPD) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 (2), Tahun 2013.
- Lewaherilla, N.E. 2002. Pemanfaatan Potensi Area Pesisir dan Lautan. Makalah Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor Manumono, Danang. 2008. Perubahan Perilaku Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten Demak. Pusat Analisis Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Marzuki. 2002. Paradigma Baru Ilmu Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pambudy R., Adhi A., editor. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Mikkelsen, B. 2001. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ojosalo, J. 2008. "Management of innovation networks: a case study of different approaches." Dalam *European Journal of Innovation Management*, 11(1) 51-86.
- Pranada, Muhammad Teguh, dkk. 2014. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Area Pesisir Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). 8th Annual Conference Of Economics Forum, Universitas Sumatera Utara.

- Prianto, E. 2005. Proseding “Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purba, Jhony. 2002. Pengelolaan Lingkungan sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Purba, Johny. 2002. Pengelolaan Lingkungan sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 156.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran (Teoretik dan Praktik Kurikulum KTSP)*. Jakarta: Prenada Media.
- Santosa, Setyanto, (2007). dalam artikelnya tentang *Peran Sosial Entrepreneurship dalam Pembangunan*, Jakarta.
- Saragih B, 2002. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT. Suveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE. Bogor. Cetakan ke-2.
- Setiawan, Wawan. 2010. Kompetensi Sumberdaya Manusia dalam Upaya Pemanfaatan Potensi Kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Perencanaan Area dan Kota*, Vol 21, No.1 April 2010
- Sumardjo, Adi Firmansyah. 2015. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasi Sumber Daya Pangan Di Sekitar Wilayah Operasional Pt. Pertamina Asset 3 Subang Field. *Agrokreatif* Vol. 1 (1): 8-19, 2015.
- Suprijanto, Iwan. 2006. Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) di Indonesia, dalam *Proceeding – Studi Dampak Timbal Balik Antara Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global*

- Tranggono, Didiek, dkk. 2017. *Perempuan Nelayan: Peran, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi Lokal*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Tranggono, Didiek, Jojok Dwiridhotjahjono, Resa Rasyidah, Sonja Andarini. 2018. *Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Sidoarjo*. Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Ke-2
- Tranggono, Didiek, dkk. 2018. *Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Penerbit Sahaja.
- Tranggono, Didiek, dkk. 2019. *Penerapan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi Lokal*. Surabaya: Penerbit Sahaja.
- Tranggono, Didiek, Praja Firdaus, dan Andre Yusuf Trisna Putra. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Surabaya: Penerbit Sahaja.
- Tranggono, Didiek dan Andre Yusuf Trisna Putra. 2020. *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Inovasi berbasis Potensi Lokal di Wilayah Desa Tertinggal Kabupaten Trenggalek*. Laporan Kemajuan Penelitian Mandiri Skema Riset Terapan 2020.
- Tranggono, Didiek; Yusuf, Andre; Firdaus, Praja. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Lokal*. Surabaya: Penerbit Sahaja.
- Wisata Bahari. Naskah Seminar, Denpasar Kajian Budaya Universitas Udayana. Bali: Universitas Udayana.

Artikel Online

- Antara Riau. 2015. Tantangan Sektor Kelautan Dari Nelayan Hingga SDA, diakses dari <http://www.antarariau.com/berita/60390/tantangan-sektor-kelautan-dari-nelayan-hingga-sda> pada 21 Agustus 2017
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten. 2011. Modul Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, Diklat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH RI – 2011, diakses dari <http://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/244/MENGENAL-EKOSISTEM-PESISIR-DAN-LAUT.html>. pada 19 Agustus 2017
- Irwanto, 2006. Keanekaragaman Fauna Pada Habitat mangrove. Yogyakarta, diakses dalam <https://www.scribd.com/document/45887194/Fauna-Mangrove>>, pada 20 Agustus 2017
- Wasak, Martha. 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dalam *PACIFIC JOURNAL. Januari 2012 Vol. 1 (7): 1339-13*2*, diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/280/1/KEADAAN_SOSIAL-EKONOMI_MASYARAKAT_NELAYAN_DI_DESA_KINABUHUTAN_KECAMATAN_LIKUPANG_BARAT._KABUPAT_EN_MINAHASA_UTARA%2C_SULAWESI_UTARA.pdf

MONOGRAF PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Perdebatan klasik antara pertumbuhan dengan pemerataan menjadi warna dalam diskursus studi pembangunan di Indonesia, secara khusus. Pada satu sisi, pertumbuhan sosial-ekonomi memang dibutuhkan untuk membangun keberlangsungan hidup yang lebih maju dan relevan. Namun, membutuhkan usaha ekstra untuk melakukan pemerataan sosial-ekonomi di daerah. Tanpa berusaha untuk berdiri di satu sisi, buku ini menawarkan pengalaman riset pemberdayaan masyarakat di daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek. Kami yakin bahwa pemberdayaan masyarakat bisa menjadi jembatan antara pertumbuhan sosial-ekonomi dengan pemerataan sosial-ekonomi masyarakat. Jembatan tersebut akan membantu banyak daerah untuk saling berkompetisi dengan sehat dan menuju Indonesia yang lebih kompeten.



Peneliti & Penerbitan:
Griya Kebraan Tengah XVII Blok FI-10 Surabaya
HP / WA : 085645678944
E-mail: perwiramedia.nusanantara@yahoo.co.id

ISBN 978-623-6611-45-6

